



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**#bangga
melayani
bangsa** #BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berintegritas, Berprincipalitas
Harmonis, Loyal, Adapatif, Inovatif

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 12 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720710 199201 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	3
1.5 Isu-isu Strategis.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Perencanaan Kinerja	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
2.3 Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	31
3.2 Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	33
3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	44
BAB IV PENUTUP	50

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI DAN KERJASAMA PERBATASAN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI

MATRIKS CAPAIAN KERJASAMA PERBATASAN

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kedudukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai perwujudan dalam menyediakan sarana yang dapat digunakan sebagai media penyampaian dokumen pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun sebelumnya (tahun n-1). Sehubungan telah dilakukannya perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau, maka penyusunan LKjIP Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Hal-hal yang dimuat dalam LKjIP mencakup indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan permasalahan-permasalahan atau hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya serta penyelesaian masalah jika sudah dilakukan yang sehingga pada tahun yang akan datang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2024 dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) Pasal 20 Ayat (3)
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 962).
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1000);

1.4 Gambaran Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan pengelolaan perbatasan. Dengan kewenangan tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengelolaan perbatasan sehingga tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga perbatasan menjadi beranda terdepan negara.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang baik. Agar batas negara dan kawasan perbatasan dapat dikelola dengan baik diperlukan kesiapan infrastruktur perbatasan dan

pengelolaan sumber daya perbatasan secara optimal. Penyiapan infrastruktur perbatasan dan pengelolaan sumber daya perbatasan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah yang membidangi pengelolaan perbatasan.

Untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan ruang informasi atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja selama tahun 2024 bagi *stakeholder* maupun unit pengawas sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan efektifitas atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini juga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah di bidang program pembangunan perbatasan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909) pasal 351 mempunyai tugas membantu Gubernur membantu Gubernur Kepulauan Riau dalam menetapkan kebijakan program pembangunan

perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan dan Bidang Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, Koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dikemukakan sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. penyiapan dan Penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
 - f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - j. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah mulai dari rencana

- kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- d. penyiapan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - e. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - f. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
 - b. pelaksanaan menginventarisasi data terkait kondisi, permasalahan dan rencana kebutuhan pembangunan Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan;
 - c. perumusan rencana induk kawasan perbatasan Negara Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. perumusan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi terkait usulan pembangunan kawasan perbatasan;
 - f. pelaksanaan evaluasi rencana induk pengelolaan kawasan;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam upaya perlindungan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di luar negeri sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri di kawasan perbatasan oleh pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerja sama Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau/Kepulauan Riau-Peringkat Negeri Johor/Melaka, IMT-GT, dan kerjasama lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Potensi Sumber Daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Potensi Sumber Daya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
 - c. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dalam upaya peningkatan pemahaman/pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan (hard skill dan soft skill) kepada masyarakat perbatasan;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengawasan dan Evaluasi, Pengendalian Informasi Perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengawasan dan Evaluasi, Pengendalian Informasi Perbatasan;
 - b. pelaksanaan menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - c. pengolahan dan menelaah data yang berkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - e. penyusunan laporan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. JABATAN FUNGSIONAL.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Susunan

Organisasi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
- b. Sub Koordinator Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri;

3. Bidang Koordinasi Pelaksanaan

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan;
- b. Sub Koordinator Potensi Sumber Daya;

4. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Pengawasan dan Evaluasi;
- b. Sub Koordinator Pengendalian Informasi Perbatasan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XXXIV : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh pegawai Sumber daya aparatur yang terbatas, Adapun jumlah pegawai ASN eksisting sebanyak 19 orang, PTT 3 orang, dan THL 5 orang, sehingga total personil sebanyak 27 orang. Sedangkan kebutuhan ASN pada BPPD adalah 81 orang sehingga kekuatan personil hanya mengcover 33,33% kebutuhan OPD.

Tabel. 1.1. Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	1	5	6
2	BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA	1	0	1
3	BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN	1	1	2
4	BIDANG MONITORING DAN EVALUASI	0	3	3
5	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	2	5	7
	JUMLAH	5	14	19

*SumberData : Aplikasi <https://silat.kepriprov.go.id/>

Tabel. 1.2. Jumlah Non PNS Badan Pengelola Berbatasan Daerah Tahun 2024

NO	Non PNS	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	Pegawai Tidak Tetap	1	2	3
2	Tenaga Harian Lepas	0	5	5
	JUMLAH	1	7	8

* Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel. 1.3. Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S-3	1	0	1
2	S-2	4	4	8
3	S-1	7	1	8
4	D-III	1	0	1
5	SLTA	1	0	1
	TOTAL	14	5	19

Sumber : Silat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

3. Aspek Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan digunakan untuk operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nilai aset yang dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.098.629.450

(Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri dari Alat Angkutan sebesar Rp. 446.800.000 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapanratus Ribu Rupiah), Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp. 629.529.450 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp 22.300.000 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Sarana dan prasana yang dikelola per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.4. Aset Yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Total Harga
1.	Alat Angkutan	1	Rp 446.800.000
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	83	Rp 629.529.450
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2	Rp 22.300.000
J U M L A H		86	Rp 1.098.629.450

*Sumber : Buku Inventaris Barang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2024

Tabel. 1.5. Rincian Aset yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	000001 s/d 000013	PAPAN NAMA	2022	Pembelian	3.246,75
2	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	000001 s/d 000002	INDACHI CASSOVA	2022	Pembelian	1.900,00
3	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	AQUA AQR-D181	2022	Pembelian	1.669,00
4	02.05.02.06.002	Televisi	000001 s/d 000002	SHARP LED TV 2T-C50DF11	2022	Pembelian	15.300,00
5	02.05.02.06.038	Dispenser	000001	SHARP SWD-66EHL-BS	2022	Pembelian	3.650,00
6	02.05.02.06.057	Karpet	000001	Karpet ASPEN	2022	Pembelian	19.780,20
7	02.05.02.06.059	Gordyn/Kray	000001 s/d 000002	-	2022	Pembelian	12.250,00
8	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000009 s/d 000010	MAXI FURNITURE	2022	Pembelian	12.746,00
9	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000010	Minotti	2022	Pembelian	8.788,00
10	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002	SAVELLO, SOLITER H	2022	Pembelian	7.215,00
11	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000021 s/d 000022	SAVELLO LUXUS LTZ	2022	Pembelian	5.200,00
12	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000023 s/d 000024	SAVELLO MEGAN L	2022	Pembelian	7.600,00
13	02.05.03.05.008	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	000001 s/d 000010	SAVELLO RUSSO VT 1 A	2022	Pembelian	12.598,50
14	02.10.01.02.001	P.C Unit	00001 s/d 00002	AIO LENOVO 3-22ITL6	2022	Pembelian	27.400,00
15	02.10.01.02.002	Lap Top	00001	ASUS	2022	Pembelian	15.200,00

				M3400QA-OLED			
16	02.10.01.02.002	Lap Top	00002 s/d 00005	HP 240 G8 (36F56PA)	2022	Pembelian	65.960,00
17	02.10.01.02.002	Lap Top	00006	ASUS ZENBOOK UM4325UA OLED 713	2022	Pembelian	17.400,00
18	02.10.01.02.002	Lap Top	00007	LENOVO YOGA 6-13AC6	2022	Pembelian	17.150,00
19	02.10.01.02.002	Lap Top	00008	ASUS ZENBOOK UM425UAZ OLED	2022	Pembelian	17.300,00
20	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001 s/d 0004	Epson L1210	2022	Pembelian	16.400,00
21	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0005 s/d 0008	L3250	2022	Pembelian	11.400,00
22	02.10.02.03.007	External	000001	Epson L1210	2022	Pembelian	1.000,00
23	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	000001	IPAD PRO11 128 GB	2022	Pembelian	19.400,00
24	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	000001	Toyota /Kijang Innova zenix 2.0 V CVT / Kijang Innova	2023	Pembelian	446.800.
25	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	000001		2023	Pembelian	9.050.
26	1.3.2.05.002.006.057	Karpet	000002	Karpet Monaco Wool / M8 164 Royal blue HT 450	2023	Pembelian	39.960.
27	1.3.2.05.002.006.059	Gordyn/Kray	0004 s/d 0006	Blackout Gold/ Blackout Gold	2023	Pembelian	18.000
28	1.3.2.09.004.002.031	Kamera Digita	000001	CANON EOS M10	2023	Pembelian	6.000
29	1.3.2.09.004.002.031	Kamera Digita	000002	SONY A6400	2023	Pembelian	16.300
30	1.3.2.10.001.002.001	P.C Uni	0003 s/d 0006	AIO Acer C24- 1750 / AIO Acer C24-1750	2023	Pembelian	73.200
31	02.10.01.02.002	Lap Top	00009	ASUS / P1412CEA_ID	2022	Pembelian	17.760

32	02.10.01.02.002	Lap Top	00010-00013	ACER TRAVELMATE P214	2023	Pembelian	72.000
33	1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	00002-00003	SAMSUNG GALAXY TAB/ TAB S9 8/128GB WIFI + CELL	2023	Pembelian	33.700
34	1.3.2.10.002.003.003	Printer	00009-00012	Ecotank L3256	2023	Pembelian	15.656
35	1.3.2.10.002.003.004	Scanner	000001	Scanner Epson WorkForce DS-1630	2023	Pembelian	8.750
36	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	000001 s/d 000002	AC PANASONIC 2PK PN18WKJ/ PN18WKJ	2023	Pembelian	20.900
Jumlah Harga							Rp1.098.629,45

Sumber : SIMDA BMD (Barang Milik Daerah)



1.5 Isu-isu Strategis (Bab III Renstra)

Isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah:

1. Sumber daya aparatur sipil negara pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah kebutuhan analis beban kerja dibutuhkan 58 ASN secara eksisting jumlah ASN yang ada saat ini hanya 21 orang sehingga hanya mampu mencover 36% beban kerja yang ada;
2. Belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum dibatas wilayah negara;
3. Belum optimalnya upaya pengawasan dikawasan perbatasan akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan pertahanan keamanan dan penegakan hukum;
4. Belum optimalnya Kerjasama Regional perbatasan negara melalui Kerjasama yang sudah eksisting seperti Sosek Malindo, IMT-GT, Sijori dan Kerjasama regional lainnya;
5. Minimnya ketersediaan infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan dalam skala regional (koneksi PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal dikawasan perbatasan;
6. Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan dikawasan perbatasan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan nilai tambah potensi SDA;
8. Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran;

9. Minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai, minimnya akses terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang memadai, rendahnya kualitas SDM akibat belum optimalnya upaya peningkatan kualitas SDM, belum mantapnya system tata kelola perbatasan, serta belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan **Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau** adalah:

”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka mensukseskan pelaksanaan **Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke 5 (lima)**, yaitu

”Mempercepat Konektivitas Antar Pulau Dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan”.

Bawa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan pasal 272 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026, yaitu:

Tujuan	: Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau
Indikator Tujuan	: Persetase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam rencana aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Sasaran	: Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga
Indikator Sasaran	: Persentase Pembangunan Rencana Aksi di Lokasi Prioritas Provinsi Kepulauan Riau

Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan dan Batas Wilayah Negara untuk jangka menengah disebut dengan Rencana Induk yang berlaku selama 5 Tahun, Kemudian

Dokumen ini diturunkan menjadi Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Batas Wilayah Negara yang di undangkan setiap tahun.

Penyusunan Dokumen Perencanaan ini merupakan usulan-usulan dari Lokasi Prioritas di Kabupaten/Kota Perbatasan dan Stakeholder Perbatasan lainnya yang dihimpun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Forum Rakor Perbatasan yang dilaksanakan setiap tahun sebelum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.

2. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Kebijakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau dan kebijakan intern Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran – Kebijakan – Program

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang	Persetase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan	Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi	Persentase Pembangunan Rencana Aksi di Lokasi Prioritas Provinsi	1.Meningkatkan Sistem Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2.Meningkatkan Pengelolaan	1. Meningkatkan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kegiatan Antar Sektor Kawasan Perbatasan;

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Berdaulat melalui pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga	Kepulauan Riau (Percentase)	<p>Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;</p> <p>3.Meningkatnya ketersediaan data dan informasi berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terdepan, Terluar di Kawasan Perbatasan;</p> <p>4.Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dan batas wilayah negara;</p> <p>5.Meningkatkan Penguatan Kapasitas Layanan Sosial Dasar dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di kawasan perbatasan;</p> <p>6.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>7.Meningkatkan kerjasama Regional di kawasan perbatasan.</p>	<p>2. Peningkatan Fungsi Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Kawasan Perbatasan;</p> <p>3. Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kecamatan Lokasi Prioritas Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan;</p> <p>4. Memperkuat Pengelolaan serta Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Berkualitas;</p> <p>5. Memperkuat Pelaksanaan Kerjasama;</p> <p>6. Meningkatkan Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara;</p> <p>7. Peningkatan Kualitas Sinkronisasi dan Integrasi Antar Lembaga Vertikal dan Hirozontal Dalam Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;</p> <p>8. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;</p> <p>9. Memperkuat Data dan Informasi Potensi</p>

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					<p>Kecamatan Lokasi Prioritas;</p> <p>10. Meningkatkan Penyelesaian Kajian Potensi Sumber Daya dan Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan;</p> <p>11. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Komprehensif Pembangunan Kawasan Perbatasan;</p> <p>12. Penyediaan Data Hasil Kajian Komprehensif Berbasis Kecamatan Lokpri dan Pulau Terluar;</p> <p>13. Penyediaan Rencana Program Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Untuk Memastikan Kualitas SDM Masyarakat Perbatasan;</p> <p>14. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Dapat Dimanfaatkan Untuk Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru;</p> <p>15. Meningkatkan Layanan Sosial Dasar Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan;</p>

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan karsipan.	<p>1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p>

3. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. (Moheriono, 2012). Kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan uraian tugas dan fungsi.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah

tujuan sudah tercapai. (Tim BPKP, PermenPAN & RB Nomor 20/I/M.PAN/11/2008).

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai urutan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. IKU ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal business process*).

Penyusunan IKU dalam SAKIP telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Dalam proses perencanaan setiap tahun anggaran setiap pimpinan unit kerja/organisasi selanjutnya menetapkan IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga	Persetase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	%	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan kerjasama Perbatasan yang diimplementasikan dibagi Jumlah Total Rencana Aksi dan Usulan Kerjasama Perbatasan Dikali 100%	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Bidang Koordinasi Pelaksanaan Bidang Monitoring dan Evaluasi
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Predikat)	Predikat	Nilai SAKIP	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. (PermenPAN & RB Nomor 53 tahun 2014).

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Persetase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	55%	Program Pengelola Perbatasan
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

*)Lihat pada lampiran “Perjanjian Kinerja Tahun 2024”

Perjanjian Kinerja di tahun 2024 diawali dengan Penandatanganan Bersama Gubernur Kepulauan Riau H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M, di awal tahun bersamaan dengan penyerahan Daftar Pagu Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

2.3 Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri

Program Pengelola Perbatasan yang menjadi urusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri dapat dilihat dalam tabel di bawah :

Tabel 2.4
Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri Tahun 2024

No.	Program	Indikator Program	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelola Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	55 %	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan kerjasama Perbatasan yang diimplementasikan dibagi Jumlah Total Rencana Aksi dan Usulan Kerjasama Perbatasan Dikali 100%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang terealisasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Untuk dapat mengukur keberhasilan setiap target kinerja tentunya melakukan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja. Setiap pengukuran didasari oleh indikator yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang dijadikan pengukuran kinerja adalah pernyataan kinerja sasaran strategis yang kemudian ditentukan dengan indikator sasaran dan dijadikan sebagai tolak ukur perhitungan keberhasilan kinerja, untuk disajikan data capaian kinerja Tahun 2024.

Adapun rumus dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan formula sebagai berikut :

- Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

c. Kesimpulan Capaian Sasaran

Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran dapat diambil dengan cara melakukan rata-rata atas capaian indikator kinerja yakni menjumlahkan masing-masing capaian indikator kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja dalam satu sasaran tersebut.

d. Nilai capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal**

NO	RENTANG CAPAIAN Realisasi Negatif	RENTANG CAPAIAN Realisasi Positif	KATEGORI CAPAIAN
1.	Kurang dari 55%	Lebih 100%	Sangat Baik
2.	55% sampai 75%	75% sampai 100%	Baik
3.	75% sampai 100%	55% sampai 75%	Cukup
4.	Lebih 100%	Kurang dari 55%	Kurang

Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada setiap awal tahun anggaran Perangkat Daerah memiliki ketetapan kinerja yang dijadikan Perjanjian Kinerja Pimpinan atau Kepala Daerah, dan tentunya Perjanjian Kinerja tersebut telah menyesuaikan dengan rencana kerja jangka menengah yang termuat dalam RPJMD dan Renstra. Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7
1	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Persetase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	55%	70,62%	100 %	Sangat Baik
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	B	B	Sangat Baik

**)Lihat pada lampiran "Pengukuran Kinerja Tahun 2024"*

3.2 Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2024

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dianalisa sebagai berikut :

- Tujuan** : **Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau.**
- Indikator Tujuan** : **Persetase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase).**

Dalam rangka terwujudnya kualitas tata perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan koordinasi sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan yang baik, maka perlu didukung dan dilakukan fasilitasi koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal agar pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan menjadi lebih baik. Tentunya dengan tambahan dukungan secara teknis dari stakeholder terkait dalam mempersiapkan kebutuhan infrastruktur perbatasan dan pengelolaan sumber daya perbatasan secara optimal. Agar tujuan tersebut dapat terealisasi dan optimal di lapangan maka sinergitas, fasilitasi dan koordinasi menjadi kunci utama untuk menjembatani antara kebutuhan (BWN-KP) dan implementasinya (OPD Teknis), dimana kerja tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah yang membidangi pengelolaan perbatasan.

Oleh karenanya untuk menjalankan Program Pengelola Perbatasan dengan target indikator kinerja yaitu tercapainya realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan dan kerjasama perbatasan, dimana acuan dasar pelaksanaan program kegiatan adalah Renduk yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Berdasarkan Rencana Induk yang telah ditetapkan maka diturunkan menjadi Rencana Aksi Tahunan yang memuat program kegiatan secara rinci, yang mana dalam dokumen program/kegiatan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan telah ditetapkan tersebut, terdapat sebanyak 310 program kegiatan yang pelaksanaannya berada di 5 Kabupaten/Kota, tersebar pada 35 Kecamatan Lokasi Prioritas dan 22 terluar, dan juga diperoleh usulan kerjasama perbatasan (Sosekmalindo) berjumlah 44 usulan kerjasama. Sehingga target indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 354 Kegiatan pada Tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan data diatas, rincian realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan dan kerjasama perbatasan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.3
Tabel Realisasi Indikator Kinerja



Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Evaluasi Realisasi
Rencana Aksi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama
Perbatasan Tahun 2024

NO	URAIAN	2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase) Tahun 2022, 2023 Indikator tidak melibatkan Variable Kerjasama Perbatasan*	NA	NA	35%	49,47%	45%	76,68%	55%	70,62%

Tabel Realisasi Rencana Induk Perbatasan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase) *Tahun 2022, 2023 Indikator tidak melibatkan Variable Kerjasama Perbatasan*	NA	49,47	76,68	70,62

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 diatas, dapat diuraikan bahwa target realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan dan kerjasama perbatasan pada tahun 2024 sebesar 55 % setelah dilakukan evaluasi dan monitoring serta kegiatan kerjasama perbatasan (SOSEKMALINDO), maka diperoleh realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan dan kerjasama perbatasan berdasarkan program kegiatan yang ditetapkan sebesar 70,62 % melebihi target yang ditetapkan sebesar 55% dengan penilaian masuk Kategori Sangat Baik.

SASARAN STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mencapai tujuan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dalam dokumen rencana strategis yaitu Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang akan dicapai disetiap tahunnya. Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Sasaran Strategis 1 “ Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga”

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar Lembaga *Tahun 2022, 2023 Indikator tidak melibatkan Variable Kerjasama Perbatasan*	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	55%	-	49,47%	76,68%	70,62%	

Pada kelompok sasaran strategis 1 yaitu "Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar Lembaga", dapat dilihat dalam tabel 3.5 bahwa dari indikator kinerja tersebut, realisasi indikator kinerjanya di atas target persentase realisasi Perencanaan Realisasi Pembangunan Rencana Aksi Perbatasan dan kerjasama perbatasan. Strategi kedepan akan dipertahankan pencapaian persentase tersebut dengan tetap memberikan data dukung sesuai dengan persyaratan yang ada. Adapun faktor penyebab yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- Data existing kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan
- Data hasil pembangunan kawasan perbatasan yang telah dilaksanakan

- Terpenuhinya usulan kerjasama SOSEK MALINDO dari stakeholder yang melakukan kerjasama sosekmalindo
- Terjalinnya koordinasi yang baik di lintas sektoral dan Badan Pengelola Perbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar Lembaga	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	55%	70,62	100%

Realisasi implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Pencapaian Sasaran "implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan" dapat diukur dari indikator kinerja realisasi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dengan perhitungan Program/kegiatan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terdapat pada 5 Kabupaten dan 35 Lokpri serta 22 terluar, dan Realisasi

Kerjasama Perbatasan. Adapaun rumus perhitungan pencapaian realisasi kinerja sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dan Kerja Sama Perbatasan yang dilakukan}}{\text{Jumlah Total Rencana Aksi dan Usulan Kerja sama Perbatasan}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{354}{250} \times 100 \% = 70,62 \%$$

Tabel 3.7

Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan	Realisasi	Persentase (%)
1	Rencana Aksi Pembangunan	310	224	72
2	Kerjasama Perbatasan	44	26	59
TOTAL		354	250	70,62

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan diperoleh hasil yaitu, realisasi program/kegiatan rencana Aksi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan sebanyak 224 Program/kegiatan, dan usulan kerja sama perbatasan sebesar 26 usulan, sedangkan jumlah program kegiatan rencana aksi pembangunan tahun 2024 sebanyak 310 Program/kegiatan dan Kerjasama Perbatasan Sebanyak 44

Usulan Kerjasama. Adapun target realisasi kinerja tahun 2024 ditetapkan sebesar 55% maka berdasarkan perhitungan rumus diatas diperoleh target realisasi kinerja sebesar 70,62%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai.

Hasil evaluasi nilai realisasi implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dengan target sebesar 55% dapat terealisasi sebesar 70,62%. Sehingga capaian implementasi Pembangunan dan kerjasama Perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 100 % atau dapat dikatakan dalam **Kategori Sangat Baik**. Peningkatan indikator yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prvinsi Kepulauan Riau yaitu:

- Update data pembangunan yang telah dilaksanakan
- Dilakukannya koordinasi lintas sektoral dan Pemeintah Kabupaten/Kota
- Suport anggaran dari daerah terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan
- Menjalin kerjasama luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pendapatan negara

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini pada dasarnya dalam Pelaksanaan monitoring rencana aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau adalah kondisi geografis yang menyebabkan lokasi kegiatan tidak dapat dimonitoring secara maksimal, biaya yang cukup tinggi dan keterbatasan anggaran monitoring hingga ke pulau-pulau terluar, belum sinkronnya program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lintas instansi terkait, serta usulan kerjasama dari Stakeholder yang belum dapat diukur dengan Kompetibel. Disamping itu juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur yang hanya mengcover 36% kebutuhan analisis beban kerja dari total

kebutuhan ASN sebanyak 83 orang, sehingga berakibat belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

STRATEGI PERBAIKAN KINERJA

Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)

Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Kabupaten/Kota tentang data pelaksanaan pembangunan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan, serta akan dibangun sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial.

Penyampaian Usulan Kerjasama SOSEK MALINDO dari Stakeholder harus terukur dan menguntungkan kedua belah pihak.

Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Kabupaten/Kota tentang data pelaksanaan pembangunan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan, serta akan dibangun sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Pengeloaan Perbatasan, dengan Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahhan Perbatasan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 452.198.328,- atau

99,46% dari total pagu sebesar Rp. 454.640.774,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,54% dari pagu yang ditentukan.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau”

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Predikat)	B	NA	B	B	B	-

STRATEGI PERBAIKAN KINERJA

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Strategi kedepan akan akan ditingkatkan pencapaian nilai tersebut dengan tetap memberikan data dukung sesuai dengan kebutuhan dan melakukan koordinasi yang sinergis dengan Bidang-bidang.

Pada kelompok sasaran strategis 2 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau", dapat dilihat dalam tabel 3.7 bahwa dari indikator kinerja tersebut, seluruh realisasi indikator kinerjanya mencapai target, yakni Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Strategi kedepan akan akan ditingkatkan pencapaian nilai tersebut

degan tetap memberikan data dukung sesuai dengan kebutuhan dan melakukan koordinasi yang sinergis dengan Bidang-bidang.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	B	

Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini kurangnya Data dukung dan belum sinergisnya koordinasi dengan bidang-bidang.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 6.423.829.366,- atau 90,70% dari total pagu sebesar Rp. 7.082.426.978,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,3% dari pagu yang ditentukan.

CAPAIAN KINERJA TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama yang dilaporkan pada kesempatan ini adalah Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

**Tabel 3.10
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	55%	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan kerjasama Perbatasan yang diimplementasikan dibagi Jumlah Total Rencana Aksi dan Usulan Kerjasama Perbatasan Dikali 100%	70,62%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	Nilai SAKIP	B

3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi per sasaran pembangunan

Berikut adalah capaian kinerja keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 terhadap sasaran dan indikator. Pada setiap rencana pencapaian sasaran melalui indikator yang disusun, maka terdukung oleh anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan dan pencapaian program. Hal ini termuat dalam rencana kerja SKPD yang dijadikan dalam Daftar Pengelolaan Anggaran pada setiap tahunnya.

Tabel 3.11

Sasaran 1 : Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar Lembaga

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4
Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi,Sinkronisasi dan Integrasi antar Lembaga	Persentase Pembangunan Rencana Aksi di Lokasi Prioritas Provinsi Kepulauan Riau (Persentase)	454.640.774,-	452.198.328,-

Tabel 3.12

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Predikat)	7.082.426.978,-	6.423.829.366,-

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Anggaran
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp) Tahun 2023			Anggaran (Rp) Tahun 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
1	Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi antar Lembaga	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	8.602.755.252,-	8.277.913.770,-	96,22	7.537.067.752,-	6.876.027.694,-	91,23	-

2. Realisasi Anggaran

Jumlah Total Pagu Anggaran Perubahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah Rp. 7.537.067.752,- yang terbagi dalam dua Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.082.426.978,- dan capaian realiasi sebesar Rp. 6.423.829.366 atau 90,70 %. Dan Program Pengelolaan Perbatasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 454.640.774,- dan capaian realiasi sebesar Rp. 452.198.328,- atau 99,46%.

Anggaran utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis adalah Rp. 454.640.774,- dengan realisasi sebesar Rp. 452.198.328,- atau 99,46 % sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.14
REALISASI ANGGARAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2024**

No	Program/kegiatan	Pagu anggaran	Realiasi anggaran	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.082.426.978	6.423.829.366	90,70
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.681.420	188.733.203	99,50
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.999.859.543,27	5.349.097.061	89,15
3	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	25.034.000	24.925.600	99,57
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.065.119,73	434.490.377	99,64
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0		
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.174.630	350.496.213	98,96
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.612.265	76.086.912	98,03
II	Program Pengelola Perbatasan	454.640.774	452.198.328	99,46
8	Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	104.697.874	104.151.374	99,48
9	Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	203.803.800	202.903.594	99,56
10	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	146.139.100	145.143.360	99,32
	TOTAL	7.537.067.752	6.876.027.694	91,23

Indikator Kinerja Program yang dilaporkan pada kesempatan ini adalah Indikator Kinerja Program Pengelola Perbatasan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Program
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No.	Program	Indikator Program	Target	Formulasi	Perhitungan	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	Program Pengelola Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	55%	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan kerjasama Perbatasan yang diimplementasikan dibagi Jumlah Total Rencana Aksi dan Usulan Kerjasama Perbatasan Dikali 100%	$\frac{354}{247} \times 100\%$	70,62%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi	100	100 %
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang terealisasi	100	100%

Berdasarkan table 3.15 diatas, dimana indikator kinerja program Badan Pengelola Perbatasan Daerah diukur melalui penetapan program pengelola perbatasan dengan indikator program persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan dengan target sebesar 55 %. Berdasarkan cara penghitungan yang ditetapkan yaitu jumlah realisasi Jumlah Usulan kegiatan

pembangunan dan kerjasama Perbatasan yang diimplementasikan dibagi jumlah total rencana aksi dan usulan kerjasama perbatasan dikali seratus persen menghasilkan perhitungan realisasi Indikator Kinerja Program sebesar 70,62%. Hal ini menunjukan bahwa Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencapai target yang ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari semua indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 semuanya terealisasi melebihi target sasaran yang ditetapkan, dan jika dilihat dari capaian realisasi Tahun 2024 terhadap realisasi fisik sampai dengan 100% dan realisasi keuangan 91,23%;
2. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus di tempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja.

Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

- Pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan sebagai lembaga yang berperan menguatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan perbatasan tahun 2024 meskipun secara fisik telah sesuai dengan tingkat pencapaian yang ditargetkan, namun demikian peran ini harus lebih diperkuat terutama menyangkut tugas dan fungsi fasilitasi dan koordinasi dan upaya mendapatkan data yang akurat tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan hal ini mutlak menjadi perhatian terutama agar kinerja SKPD yang terkait pengelola perbatasan dapat saling bersinergi sebagai upaya mendukung pencapaian peningkatan pengelolaan perbatasan yang lebih baik;
- Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota guna memperoleh dan mensinkronisasikan data-data pelaksanaan pembangunan rencana aksi di wilayah perbatasan

yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan, serta mengupayakan sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial.

- Meningkatkan upaya dalam menyampaikan usulan Kerjasama SOSEK MALINDO antara Pemerintah dan Stakeholder secara terukur dan menguntungkan kedua belah pihak.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya masing – masing;
- Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja bagi aparatur;
- Menciptakan budaya kerja bagi aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan Disiplin;
- Tertib dalam pencapaian perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

B. SARAN

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan kelembagaan kepada pihak/lembaga terkait dalam mendukung pengembangan perbatasan kedepan
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program/kegiatan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan tepat guna meningkatkan kemajuan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun secara bertahap.
4. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pembangunan di Kawasan Perbatasan, khususnya di Provinsi

Kepulauan Riau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat memerlukan penganggaran yang cukup agar terpenuhinya capaian rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Tersedianya aplikasi berbasis elektronik yang menghimpun data-data hasil pembangunan di kawasan perbatasan dan rencana pembangunan setiap tahunnya dilakukan secara update dan berkala sehingga diperoleh data pembangunan kawasan perbatasan yang lebih akurat, up to date dan terukur dengan baik.
7. Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja pelaporan (LAKIP) maka perlu adanya Bimbingan Teknis kepada Aparatur pemerintah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
8. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau merupakan organisasi yang baru dibentuk yakni 3 tahun berjalan, dengan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Oleh sebab itu pemberdayaan SDM secara optimal perlu dilakukan sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.



DOKUMENTASI

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024**

DOKUMENTASI

1. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si menghadiri penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 ini diserahkan oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE, MM, kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompaik.



2. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, memimpin rapat internal dilingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, rapat ini membahas tentang APBD TA 2024.



3. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si Didampingi Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitasi Kerjasama BPPD Provinsi Kepulauan Riau Erlizawati,MM, Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Teddy Mar Dan Perencana Ahli Muda Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Rosita, SE, MM Menghadiri Rapat Evaluasi TW 4 Perubahan APBD T.A 2023 Bersama Mitra Kerja Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Di Gedung Graha Kepri Kota Batam.



4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, di TRANS Convention Centre - Aston Tanjungpinang Jl. Adi Sucipto, Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125.



5. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, mengikuti audiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Sekretaris Utama BNPP RI dan Sekretaris Jenderal Kemendagri, terkait terlaksananya rehab 10 kantor Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas.



bangga melayani #AKHLAK

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DRs. H. DOLI BONIARA, M.SI, MENGIKUTI
AUDIENSI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS DENGAN SEKRETARIS UTAMA BNPP RI
DAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI, TERKAIT
TERLAKSANANYA REHAB 10 KANTOR DESA DI KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS.**



bangga melayani #AKHLAK

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DRs. H. DOLI BONIARA, M.SI, MENGIKUTI
AUDIENSI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS DENGAN SEKRETARIS UTAMA BNPP RI
DAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI, TERKAIT
TERLAKSANANYA REHAB 10 KANTOR DESA DI KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS.**



6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Rapat Koordinasi Kelitbang Seri I: Pemanfaatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam rangka mewujudkan Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya sebagaimana tercantum pada Visi RPJMD.



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI KELITBANGAN SERI I: PEMANFAATAN INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA VISI RPJMD.



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI KELITBANGAN SERI I: PEMANFAATAN INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA VISI RPJMD.



7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan TA. 2024, Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



#banggotangerang #AKHLAK

**1.BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI BIDANG
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TA. 2024,
SEHUBUNGAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**



#banggotangerang #AKHLAK

**1.BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI BIDANG
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN TA. 2024,
SEHUBUNGAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**



8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menghadiri Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Evaluasi Hasil Capaian Renja Perangkat Daerah Tw. IV TA. 2023.



9. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 26 Februari 2024 di Gedung Daerah Tanjungpinang.



10. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja dari Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna, kepala dinas PTSP kabupaten Natuna dan kepala dinas DKP kabupaten Natuna.



11. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama BPPD Provinsi Kepulauan Riau Erlizawati,MM beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan Rony Kartika dan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan peninjauan Pilar Titik Reverensi (PTR) di Tanjung Seding Bintan.



12. Badan pengelola perbatasan daerah provinsi Kepulauan Riau (BPPD KEPRI) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengunjungi nelayan suku laut di Kampung Panglong Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Dalam kunjungan tersebut dihadiri langsung Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, ST, M.Si, beserta Tim, Kabag Perbatasan Setda Kabupaten Bintan Sri Rahayu SE, Kabid Perencana Fasilitasi dan Kerjasama BPPD Provinsi Kepri Erlizawati S.Sos.MM serta Kades Berakit M. Darus



13. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat internal RENSTRA dilingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



14. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, khususnya terkait sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aston Hotel Tanjungpinang, Kamis (29/2).

Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon, yang hadir bersama Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Darat Ismawan Haryono, dan bertindak selaku moderator panel diskusi Perencana Ahli Madya Wilianto Siagian.



15. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat internal RENSTRA dilingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 1 MARET 2024.



16. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024, dan usulan Program/Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024



17. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, mewakili Gubernur Kepulauan Riau menghadiri Upacara Pembukaan Pendidikan Dikmata TNI AL Angkatan XLIV Ta 2024, bertempat di Lapangan Mako Satdik 1 Tanjung Uban, Jl.Diponegoro No 43, Kampung Jeruk, Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.



18. Kunjungan Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam terkait monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK).



19. Monitoring dan evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 di SD NEGERI 001 Sekupang, Kota Batam.



20. Monitoring dan evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 di SD NEGERI 003 Sekupang, Kota Batam.



21. Monitoring dan evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 di SD NEGERI 008 Lubuk Baja, Kota Batam



22. Kunjungan Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Kantor Camat Belakang Padang, yang termasuk kedalam Lokasi Prioritas (LOKPRI) di Kepulauan Riau.



23. Monitoring dan evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 di SD NEGERI 004 Belakang Padang, Kota Batam



24. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, melakukan kunjungan kerja Bersama KOMISI I DPRD Provinsi Kepulauan Riau ke Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, di Jakarta



25. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, menghadiri Rapat Tim Kelompok Kerja I, II dan III dalam rangka penyiapan data usulan pada Persidangan ke-17 Sekretariat Bersama Sosek Malindo.



26. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si Mengikuti Konferensi Pers Terkait Penangkapan Nelayan Kabupaten Natuna Oleh pihak APMM Malaysia Konferensi Pers ini juga diikuti oleh Konsulat Jenderal RI KUCHING, OPD Terkait, dan Para Awak Media



**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DRs. H. DOLI BONIARA, M.SI
MENGIKUTI KONFERENSI PERS TERKAIT PENANGKAPAN
NELAYAN KABUPATEN NATUNA OLEH PIHAK APMM
MALAYSIA KONFERENSI PERS INI JUGA DIIKUTI OLEH
KONSULAT JENDERAL RI KUCHING, OPD TERKAIT, DAN
PARA AWAK MEDIA**



**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DRs. H. DOLI BONIARA, M.SI
MENGIKUTI KONFERENSI PERS TERKAIT PENANGKAPAN
NELAYAN KABUPATEN NATUNA OLEH PIHAK APMM
MALAYSIA KONFERENSI PERS INI JUGA DIIKUTI OLEH
KONSULAT JENDERAL RI KUCHING, OPD TERKAIT, DAN
PARA AWAK MEDIA**



27. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si melakukan konsultasi dan pembahasan penanganan terhadap penangkapan Nelayan asal Natuna, Provinsi Kepulauan Riau oleh Maritim Negeri Serawak serta melakukan konsultasi pengamanan batas wilayah negara dan lintas batas negara di Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta.



28. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si mengikuti Rapat Identifikasi Batas Maritim oleh kapal-kapal Nelayan Indonesia di Perbatasan Negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Australia untuk Menyusun Pedoman Umum Gerakan Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Batas Maritim Indonesia. Yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, di GH Universal Hotel, Jl. Dr Setiabudi, Kota Bandung.



29. Rapat Persiapan Sidang Ke-20 Jkk/kk Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia Indonesia



30. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, Bersama kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan koordinasi dengan KJRI Johor Bahru Malaysia dan jawatan Pembangunan Tioman melakukan Pertemuan dengan Pihak Pengelola Tioman yang juga dihadiri oleh Parlemen Negeri Pahang sesuai arahan bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan Upaya Pembangunan ekonomi di perbatasan. Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat Tioman yang berasal/ pertalian darah dengan keluarga asal Kabupaten Kepulauan Anambas. Terutama dari daerah Letung / Jemaja. Daerah Pemerintah Negeri Pahang sudah merencanakan jalur transportasi antara Tioman Letung. Pihak Tioman/ Pahang mendukung Upaya Pembangunan Ekonomi sesuai Arahan Bapak Gubernur Kepulauan Riau.



31. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, Bersama stakeholder BPPD Provinsi Kepri mengikuti rapat Paparan LKPJ Tahun 2024 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau.



32. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, melakukan Koordinasi Terkait Ditangkapnya Nelayan Bintan Dan Persiapan Sosek Malindo 2024.



33. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, Bersama stakeholder BPPD Provinsi Kepulauan Riau mengikuti MUSRENBANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah Desk Kelompok Infrastruktur dan Kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau



34. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, Bersama stakeholder BPPD Provinsi Kepulauan Riau mengikuti MUSRENBANGNAS secara Online.



35. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, menghadiri kunjungan resmi Menteri Besar Johor ke Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.



36. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, mengikuti Rapat interkem back-to-back kunjungan Menteri Besar Johor, YAB Dato' Onn Hafiz, ke kantor Gubernur Kepulauan Riau. Pembahasan topik kerjasama terkait lainnya termasuk diplomasi perbatasan, akses pendidikan bagi anak-anak PMI Non-Prosedural, pelindungan WNI, dan inisiatif kerjasama terkait lainnya.



37. Bidang Kooordinasi Pelaksanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melaksanakan Focus Group Discussion Dalam Rangka Pemeliharaan Dan Pengamanan Batas Negara di Kepulauan Riau Tanggal 12 Agustus 2024.



38. Bidang Monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaporan pelaksanaan Kawasan perbatasan pada 13 Agustus 2024 kegiatan ini perlukan untuk melihat perkembangan Laporan realisasi Pembangunan yang telah terealisasi dan kendala – kendala dalam pengumpulan data pada Tahun 2024.



39. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, menghadiri Audiensi Bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dispotmar Mabes TNI dan KOARMADA I.



**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DRs. H. DOLI BONIARA, M.SI,
MENGHADIRI AUDIENSI BERSAMA SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN DISPOTMAR MABES
TNI DAN KOARMADA I.**



40. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, menghadiri Persidangan Ke-17 Sekretariat Bersama Kk/Jkk Sosek Malindo di Yogyakarta.



41. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menjadi Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Pottaswilud diwilayah Lanud Raja Haji Fisabilillah



42. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, Menghadiri Pertemuan FGD dalam Rangka Pembuatan Pedoman Implementasi dan Pengembangan Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau-Pulau Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



43. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si dan Tim Delegasi Riau melanjutkan pertemuan di Malaka, Selasa, 25 Juni 2024. Pertemuan dilakukan dengan Ketua Menteri Malaka dengan melibatkan Pihak Riau, Kepri, Johor dalam rangka melakukan tindak lanjut pertemuan Sosek Malindo.



44. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, Menjadi Narasumber Pada Rapat Kominda Provinsi Kepulauan Riau Terkait Antisipasi Kejahatan Lintas Negara Di Wilayah Kepulauan Riau.



45. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si Bersama Tim dari BPPD Provinsi Kepulauan Riau dan Delegasi dari Pemerintah Provinsi Riau Melakukan Kunjungan Untuk Menjalin Silaturahmi dan Koordinasi dengan KJRI Johor dan Pemerintah Malaysia.



46. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si Bersama dengan tim dari BPPD Provinsi Kepulauan Riau dan Stakeholder Terkait melakukan tindakan pemulangan Nelayan Kepri dari Perairan Perbatasan Indonesia Malaysia. Sebanyak 16 orang nelayan asal Kepri yang ditahan di Malaysia beserta 3 kapalnya diantar langsung oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim (APM) Malaysia sampai wilayah perbatasan dan kemudian dijemput oleh Pemerintah Indonesia dengan Kapal KN Pulau Nipah 321 milik Bakamla / TNI AL.



47. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si, menghadiri pelantikan Pejabat Pengelola PLBN Seluruh Indonesia bertempat di PLBN Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat



48. Sosek Malindo ke 20 Tingkat Riau/Kepulauan Riau dan Malaka/Johor Tahun ini sebagai tuan rumah adalah Indonesia tepatnya di gelar pada tanggal 30 september 2024 hingga 4 Oktober 2024 di Premiere Hotel & Convention, Riau Pekanbaru. Peresmian Pembukaan Rapat pertemuan Tim Tekhnis dan persidangan ke 20 KK/JKK Sosek oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ir. Muhammad Taufiq Oesman Hamid, MT.



49. Sosek Malindo ke 37 Tingkat Provinsi Kaliamntan Barat – Peringkat Negeri Serawak Tahun ini sebagai tuan rumah adalah Indonesia tepatnya di gelar pada tanggal 22 November 2024 hingga 24 November 2024 di Hotel Swiss – Belinn, Singkawang, Kalimantan Barat.



50. Sidang Ke-39 Kelompok Kerja/ Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK/JKKSosek Malindo Dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 – 07 Desember 2024 di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Indonesia



bangga
melayani
bangsa #AKHLAK

**1.SIDANG KE-39 KELOMPOK KERJA/ JAWATAN KUASA
KERJA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI INDONESIA –
MALAYSIA (KK/JKKSOSEK MALINDO DILAKSANAKAN
PADA TANGGAL 04 DESEMBER 2024 – 07 DESEMBER
2024 DI HOTEL KYRIAD MURAYA BANDA ACEH,
INDONESIA**



bangga
melayani
bangsa #AKHLAK

**1.SIDANG KE-39 KELOMPOK KERJA/ JAWATAN KUASA
KERJA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI INDONESIA –
MALAYSIA (KK/JKKSOSEK MALINDO DILAKSANAKAN
PADA TANGGAL 04 DESEMBER 2024 – 07 DESEMBER
2024 DI HOTEL KYRIAD MURAYA BANDA ACEH,
INDONESIA**





LAMPIRAN

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024**



LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
**KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720710 199201 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terealisasinya Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan	Realisasi Rencana Induk Perbatasan	55%
2.	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi	Rp. 8.290.687.078,-	APBD
2. Program Pengelola Perbatasan	Rp. 607.050.000,-	APBD

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720710 199201 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. H. Doli Boniara, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**
Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau


Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
**Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**



Drs. H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Persetase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	55%
2.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi	Rp. 7.082.426.978,-	P APBD
2. Program Pengelola Perbatasan	Rp. 454.640.774,-	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau

Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
**Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**



Drs. H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



LAMPIRAN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI DAN KERJASAMA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024

**Rekap Daftar Rencana Capaian Rencana Aksi Pembangunan Dan Kerjasama
Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan	Realisasi	Persentase (%)
1	Rencana Aksi Pembangunan	310	224	72
2	Kerjasama Perbatasan	44	26	59
Total		354	250	70,62



LAMPIRAN

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN	REALISASI RENAKSI	PERSENTASE (%)
Provinsi Kepulauan Riau	6	3	50,00
Kabupaten Bintan	57	46	80,70
Kota Batam	57	54	94,74
Kabupaten Karimun	52	38	73,08
Kabupaten Kepulauan Anambas	56	50	89,29
Kabupaten Natuna	82	33	40,24
JUMLAH	310	224	72,26

USULAN KEGIATAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 2024

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKUSA		LOKASI
						6	7	
1	Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI Non Pemerintah	500	Orang	62.500.000	APBN	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		Kepulauan Riau
2	Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Serasan	1	Paket	1.208.158.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Kepulauan Riau
3	Pengadaan dan Pemasangan Fender Pelabuhan Tarempa	1	Paket	885.832.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Kepulauan Riau
4	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1	Unit	6.087.747.584	APLN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Bintan Pesisir
5	Peningkatan DAS dan Ekosistem	1	Unit	100.000.000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Bintan
6	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2	Unit KK	25.000.000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Bintan
7	Moner Perbatasan Polisi Kepri (Polres Bintan)	1	Kegiatan	56.828.000	APBN	Kepolisian Negara Republik Indonesia		Bintan
8	Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang telah ditetapkan	3	Ha	37.789.000	APBN	Kementerian Pertanian		Bintan
9	Pemeliharaan Kubur Induk Tanaman Kelapa Tahun 5	5	Ha	81.647.000	APBN	Kementerian Pertanian		Bintan
10	Penyusunan Dokumen Andalan Bandara Tambelan	1	Paket	100.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Bintan
11	Pekerjaan Tanah Pemenuhan Runway Strip	1	Paket	13.203.290.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Bintan
12	Pemenuhan Peralatan Kategori PKP-PK	1	Paket	700.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Bintan
13	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMK	138	Orang	553.755.000	DAK	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Bintan
14	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Keselemanan, Keamanan, dan Kesehatan di Destinasi Wisata dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata	1	Kegiatan	1.123.000.000	DAK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Bintan
15	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	3	Unit	28.718.375.158	APLN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Belakang Padang
16	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2	Unit KK	80.000.000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Kota Batam
17	Perhubungan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6.388	Ha	447.160.000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Kota Batam
18	Pembangunan jaringan distribusi listrik	1	Paket	18.452.313.740	APLN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Karimun (Belat)
19	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	1	Unit	100.000.000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Karimun
20	Kawasan Bawang Merah	10	Ha	70.000.000	APBN	Kementerian Pertanian		Karimun
21	Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang telah ditetapkan	1	Ha	17.882.000	APBN	Kementerian Pertanian		Karimun
22	Pembangunan Rumdin Kasi/Pasi Kie 2 Yon A Satbrimob Polda Kepri (Karimun) Tipe 45/5KK	5	Unit	1.369.923.750	APBN	Kepolisian Negara Republik Indonesia		Karimun
23	Pembangunan Rumdin Anggota Kie 2 Yon A Satbrimob Polda Kepri (Karimun) Tipe 36/20KK	20	Unit	4.312.764.000	APBN	Kepolisian Negara Republik Indonesia		Karimun
24	DED Bangunan/Gedung	1	Paket	400.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Karimun
25	pembuatan drainase sisi udara	1	Paket	2.560.663.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Karimun
26	Rehabilitasi Faspel Sri Mandira	1	Paket	9.030.000.000	DAK	Kementerian Perhubungan		Karimun
27	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Pelabuhan Parit I - Jl. Selat Mendau pada Desa Parit	2.5	Km	9.683.001.000	DAK	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Karimun
28	DAK Bidang Kelautan Perikanan	1	Paket	4.387.533.000	DAK	Kementerian Kelautan dan Perikanan		Karimun
29	Pengadaan Transportasi Darat Belat	1	Unit	850.000.000	DAK	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Belat
30	Penguatan Layanan Primer-Cold Storage (freezer) limbah medis	1	Unit	12.500.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Belat
31	Penguatan Layanan Primer-Cold Storage (freezer) limbah medis	1	Unit	12.500.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Merauke
32	Fasilitasi Legelasi RPPeres RDTR KPN Tarempa	1	Dokumen	1.030.000.000	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)		Kepulauan Anambas
33	Bantuan Benih Padi Inbrida	40	Ha	12.500.000	APBN	Kementerian Pertanian		Kepulauan Anambas
34	Pemeliharaan Kubur Sumber Benih Unggul Pala	1	Ha	25.991.000	APBN	Kementerian Pertanian		Kepulauan Anambas
35	Pemeliharaan Kubur Induk Tanaman Pala Tahun 6	1	Ha	28.291.000	APBN	Kementerian Pertanian		Kepulauan Anambas
36	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung	1	Paket	34.380.924.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Kepulauan Anambas (Lemaja Timur)
37	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SLB NEGERI ANAMBAS	1	Paket	70.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Siantar Selatan
38	Bantuan Benih Padi Inbrida	60	Ha	18.750.000	APBN	Kementerian Pertanian		Natuna
39	Operasional PLBN Serasan	1	PLBN	5.093.020.000	APBN	Badan Nasional Pengelola Perbatasan		Natuna (Serasan)
40	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata	1	Kegiatan	200.000.000	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Natuna
41	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Midai	1	Paket	48.573.801.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
42	Angkutan Laut Perintis R-8	1	Layanan	12.157.688.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
43	Subsidi Jalan Perintis - Ranai - Batub - Kelerik (Kab. Natuna)	1	Trayek	443.833.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
44	Ranai - Cemaga 0 Selat Lampu (Kab. Natuna)	1	Trayek	1.154.720.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
45	Kegiatan Subsidi Penyeberangan Perintis Tanjung Ubun - Mataik, Mataik - Midai, Midai - Natuna, Natuna - Subi - Serasan, Serasan - Sintete	1	Layanan	14.251.250.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
46	Kegiatan Subsidi Penyeberangan Perintis Renovasi Gedung PKP-PK	420	m3	787.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
47	Kegiatan Subsidi Penyeberangan Perintis Renovasi Gedung Operasional Teknis	168	m3	342.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
48	Kegiatan Subsidi Penyeberangan Perintis Perlusian Gedung Administrasi	166	m3	830.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
49	Kegiatan Subsidi Penyeberangan Perintis Pekerjaan Interior Gedung Terminal	1	Paket	600.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
50	Kegiatan Subsidi Penyeberangan Perintis Rekonstruksi Jalan Operasional (200m x 6m)	1.2	m3	1.800.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
51	Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis R-7	1	Layanan	23.044.414.690	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
52	Subsidi Angkutan Barang	1	Layanan	7.660.825.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
53	Pembangunan Pos Kerja Rana Wilker Selat Lampu	1	Paket	650.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan		Natuna
54	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMK	83	Orang	358.740.000	DAK	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Natuna
55	Langitan Pembangunan SKPT Natuna	1	Paket	28.531.170.291	DANA HIBAH	Kementerian Kelautan dan Perikanan		Natuna
56	DAK Bidang Kelautan Perikanan	1	Paket	4.774.520.000	DAK	Kementerian Kelautan dan Perikanan		Natuna
57	Pembangunan Amentias di Atraksi Kawasan Wisata Alam (Nonbahari) (Geosite Gunung Rana)	1	Kegiatan	1.262.000.000	DAK FISIK PARIWISATA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Natuna
58	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Keselemanan, Keamanan, dan Kesehatan di Destinasi Wisata dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pariwisata dan Pelaku Usaha Pariwisata	1	Kegiatan	1.123.000.000	DAK	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Natuna
59	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Brinjal	1	Paket	2.760.000.000	DAK	Kementerian Perhubungan		Natuna
60	Pembangunan Pengamatan Pantai Pulau Subi Kecil di Kabupaten Natuna (Pulau Terluar)	0.3	Km	23.000.000.000	DAK FISIK PARIWISATA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Natuna
61	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Semrite - Segeram	2.1	Km	6.947.700.000	DAK	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Bunguran Barat
62	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Vaccine Refrigerator	1	Unit	128.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Barat
63	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Barat
64	Penguatan Layanan Primer-Prasrama	1	Paket	1.445.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Barat
65	Pengadaan Sarana Transportasi Darat Desa Cemaga dan Cemaga Utara, Nungur Selatan	1	Unit	436.341.000	DAK	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Bunguran Selatan
66	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Selatan
67	Penguatan Layanan Primer-Prasrama	1	Paket	135.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Selatan
68	Pembangunan area bermain beserta APÉ luar ruang, TK NEGERI 003 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	200.467.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Timur
69	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, TK NEGERI 003 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	307.770.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Timur
70	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran, TK NEGERI 003 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	28.061.750	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Timur
71	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot, SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	1	Unit	256.033.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Timur
72	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Timur
73	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Timur
74	Penguatan Layanan Primer-Prasrama	1	Paket	90.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Timur
75	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 003 PENGADAH	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Timur Laut
76	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Timur Laut
77	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	1	Paket	116.418.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Utara
78	Pembangunan ruang kelas guru beserta perabotanya, SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	1	Ruang	181.872.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Utara
79	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 1 BUNGURAN UTARA	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		Bunguran Utara
80	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Utara
81	Penguatan Layanan Primer-Prasrama	1	Paket	2.045.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Bunguran Utara
82	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Serasan Timur
83	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan		Subi

84	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Terminatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Pulau Laut
85	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Terminatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Pulau Tiga
86	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Terminatur Logger	1	Unit	4.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Serasan

REALISASI RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKUKAN	LOKASI	Realisasi
								8
1	Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	50	Orang	50.070.000	APBN	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Kepulauan Riau	Terealisasi
2	Penanganan PMI Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	990	Orang	2.782.205.000	APBN	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Kepulauan Riau	Terealisasi
3	Pengawasan dan penegakan hukum keapabeanan dan cukai di KPPBC Tanjung Pinang	190	Laporan	657.127.000	APBN	Kementerian Keuangan	Kepulauan Riau	Terealisasi
4	Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 003 BINTAN PESISIR	2	Unit	284.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Pesisir	Terealisasi
5	Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 004 BINTAN PESISIR	1	Unit	142.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Pesisir	Terealisasi
6	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 003 BINTAN PESISIR	2	Ruang	664.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Pesisir	Terealisasi
7	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 004 BINTAN PESISIR	1	Ruang	332.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Pesisir	Terealisasi
8	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SD NEGERI 004 BINTAN PESISIR	1	Ruang	332.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Pesisir	Terealisasi
9	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 BINTAN PESISIR	2	Ruang	487.618.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Pesisir	Terealisasi
10	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, SMAN 1 BINTAN PESISIR	1	Ruang	105.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Pesisir	Terealisasi
11	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Vaccine Refrigerator	1	Unit	125.841.040	DAK	Kementerian Kesehatan	Bintan Pesisir	Terealisasi
12	Penyediaan Alat Surveilans Gizi-Sanitarian kit	2	Kit	199.900.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Bintan Pesisir	Terealisasi
13	Pengujian Layanan Primer-Prasarana	2	Paket	193.200.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Bintan Pesisir	Terealisasi
14	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Vaccine Refrigerator	1	Unit	125.841.040	DAK	Kementerian Kesehatan	Bintan Utara	Terealisasi
15	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termometer Logger	1	Unit	4.517.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Bintan Utara	Terealisasi
16	Pengujian Layanan Primer-Prasarana	1	Paket	408.250.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Bintan Utara	Terealisasi
17	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	15	Ruang	2.537.160.300	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
18	Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	1	Ruang	229.221.660	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
19	Rehabilitasi ruang kapela Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	1	Ruang	74.603.100	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
20	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	1	Ruang	228.098.340	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
21	Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	1	Ruang	78.092.940	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
22	Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	1	Ruang	67.847.640	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
23	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, SMP NEGERI 11 BINTAN	2	Paket	157.433.520	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
24	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	2	Ruang	723.459.040	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
25	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMP NEGERI 11 BINTAN	1	Ruang	599.058.120	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
26	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	1	Ruang	455.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
27	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	1	Ruang	455.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
28	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	1	Ruang	325.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
29	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	6	Ruang	1.920.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
30	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Perhutani, SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	1	Paket	1.500.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
31	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD ISLAM MAMBAUS SHOLAH	1	Paket	124.809.307	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bintan Utara	Terealisasi
32	Pembangunan Amfiteater dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari Dan Perairan (Pantai Trikora)	1	Kegiatan	2.784.501.000	DAK FISIK PARIWISATA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Gunung Kijang	Terealisasi
33	Pembangunan area bermotor APE kuar ruang, TK TUNAS MUDA	1	Ruang	165.400.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
34	Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya, TK TUNAS MUDA	1	Ruang	243.862.500	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
35	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, TK TUNAS MUDA	1	Ruang	243.862.500	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
36	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran, TK TUNAS MUDA	1	Paket	50.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
37	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 007 GUNUNG KIJANG	2	Ruang	347.360.200	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
38	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 007 GUNUNG KIJANG	3	Ruang	1.035.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
39	Pembangunan ruang perpusatakan beserta perabotnya, SD NEGERI 007 GUNUNG KIJANG	1	Ruang	328.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
40	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, SD NEGERI 007 GUNUNG KIJANG	1	Ruang	345.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
41	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SD NEGERI 007 GUNUNG KIJANG	1	Ruang	345.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
42	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 008 GUNUNG KIJANG	1	Paket	124.809.307	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Gunung Kijang	Terealisasi
43	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termometer Logger	1	Unit	4.517.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Gunung Kijang	Terealisasi
44	Pengujian Layanan Primer-Prasarana	1	Paket	96.600.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Gunung Kijang	Terealisasi
45	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran, TK TUNAS BANGSA	1	Paket	50.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Teluk Sebang	Terealisasi
46	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 TELLUK SEBONG	6	Ruang	1.488.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Teluk Sebang	Terealisasi
47	Rehabilitasi ruang perpusatakan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 TELLUK SEBONG	1	Ruang	269.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Teluk Sebang	Terealisasi
48	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya, SMAN 1 TELLUK SEBONG	1	Ruang	390.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Teluk Sebang	Terealisasi
49	Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya, SMAN 1 TELLUK SEBONG	1	Ruang	217.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Teluk Sebang	Terealisasi
50	Kenduri Seni Melayu	1	Kegiatan	250.000.000	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota Batam	Terealisasi
51	Pembangunan area bermotor APE kuar ruang, TK ISLAM MENTARI	1	Ruang	163.082.800	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batam Kota	Terealisasi
52	Pembangunan area bermotor APE kuar ruang, TK PEMBINA II	1	Ruang	163.082.800	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batam Kota	Terealisasi
53	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, TK PEMBINA II	2	Ruang	451.216.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batam Kota	Terealisasi
54	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran, TK ISLAM MENTARI	1	Paket	50.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batam Kota	Terealisasi
55	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran, TK PEMBINA II	1	Paket	50.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batam Kota	Terealisasi
56	Pembangunan ruang perpusatakan beserta perabotnya, SMPS CENDANA	1	Ruang	405.518.234	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batam Kota	Terealisasi
57	Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya, SMPS CENDANA	1	Ruang	551.492.434	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batam Kota	Terealisasi
58	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termometer Logger	2	Unit	8.994.800	DAK	Kementerian Kesehatan	Batam Kota	Terealisasi
59	Pengujian Layanan Primer-Prasarana	1	Paket	650.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Batam Kota	Terealisasi
60	Pembangunan selasar penghubung, SLB KARTINI BATAM	1	Ruang	120.928.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batu Ampar	Terealisasi
61	Pembangunan kantin beserta perabotnya, SLB KARTINI BATAM	1	Ruang	368.947.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Batu Ampar	Terealisasi
62	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 004 BELAKANG PADANG	6	Ruang	967.897.308	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belakang Padang	Terealisasi
63	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SD NEGERI 004 BELAKANG PADANG	1	Ruang	269.150.218	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belakang Padang	Terealisasi
64	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 004 BELAKANG PADANG	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belakang Padang	Terealisasi
65	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 13 BATAM	4	Ruang	973.964.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belakang Padang	Terealisasi
66	Rehabilitasi ruang perpusatakan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 13 BATAM	1	Ruang	270.382.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belakang Padang	Terealisasi
67	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya, SMAN 13 BATAM	1	Ruang	369.152.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belakang Padang	Terealisasi
68	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan, SMAN 13 BATAM	1	Paket	26.250.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belakang Padang	Terealisasi
69	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termometer Logger	1	Unit	4.497.400	DAK	Kementerian Kesehatan	Belakang Padang	Terealisasi
70	Pengujian Layanan Primer-Prasarana	1	Paket	694.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Belakang Padang	Terealisasi
71	Pembangunan area bermotor APE kuar ruang, TK PEMBINA III	1	Ruang	163.082.800	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bengkong	Terealisasi
72	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SMP NEGERI 62 BATAM	7	Ruang	2.002.303.688	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bengkong	Terealisasi
73	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya, SMP NEGERI 62 BATAM	1	Paket	139.709.858	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bengkong	Terealisasi
74	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Vaccine Refrigerator	1	Unit	126.500.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Bengkong	Terealisasi
75	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termometer Logger	2	Unit	8.994.800	DAK	Kementerian Kesehatan	Bengkong	Terealisasi
76	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 008 LUBUK BAJA	2	Ruang	322.632.436	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lubuk Raja	Terealisasi
77	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 002 LUBUK BAJA	3	Ruang	483.948.654	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lubuk Raja	Terealisasi
78	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 008 LUBUK BAJA	1	Ruang	269.150.218	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lubuk Raja	Terealisasi
79	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 002 LUBUK BAJA	1	Ruang	269.150.218	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lubuk Raja	Terealisasi
80	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran, TMK PEMBINA I	1	Paket	50.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
81	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 001 SEKUPANG	6	Ruang	967.897.308	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
82	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 003 SEKUPANG	4	Ruang	645.264.872	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
83	Rehabilitasi ruang perpusatakan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 001 SEKUPANG	1	Ruang	168.668.190	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
84	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 003 SEKUPANG	1	Ruang	161.316.218	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
85	Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 003 SEKUPANG	1	Ruang	129.602.318	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
86	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 001 SEKUPANG	7	Ruang	1.884.051.526	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
87	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 003 SEKUPANG	12	Ruang	3.229.802.616	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
88	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 001 SEKUPANG	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
89	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 003 SEKUPANG	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
90	Pembang							

92	Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya, SMK NEGERI 4 BATAM	1	Ruang	150.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
93	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Desain Grafika, SMK NEGERI 4 BATAM	1	Paket	1.350.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
94	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Rekayasa Perangkat Lunak, SMK NEGERI 4 BATAM	1	Paket	1.350.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
95	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Desain Grafika, SMK NEGERI 4 BATAM	1	Ruang	1.450.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
96	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Rekayasa Perangkat Lunak, SMK NEGERI 4 BATAM	1	Ruang	1.450.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sekupang	Terealisasi
97	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Vaccine Refrigerator	1	Unit	126.500.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Sekupang	Terealisasi
98	Penyediaan Alat Surveilans Gizi-Sanitarikit	1	Kit	99.950.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Sekupang	Terealisasi
99	Pengadaan Layanan Primer-Prasarana	1	Paket	610.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Sekupang	Terealisasi
100	Pengadaan Layanan Primer-Cold Storage (freezer) limbah medis	1	Unit	12.500.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Sekupang	Terealisasi
101	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instansi Farmasi Kabupaten/Kota/Kendaraan Distribusi	1	Unit	685.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Sekupang	Terealisasi
102	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	3	Unit	13.492.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Nongsa	Terealisasi
103	Pengadaan Layanan Primer-Prasarana	3	Paket	2.194.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Nongsa	Terealisasi
104	Perluasan Halaman Parkir PKP-PK (17m x 12m) , termasuk Jalan Akses (170 m x 5 m) Bandra Raja Hajji Abdulrah	1	Paket	4.416.400.000	APBN	Kementerian Perhubungan	Karimun	Terealisasi
105	Pengadaan dan Pemasangan Pagar BRC Sisi Utara Tinggi 2,44 m	1	Paket	6.253.730.000	APBN	Kementerian Perhubungan	Karimun	Terealisasi
106	Rehabilitasi ruang keruskatan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 004 KARIMUN	1	Ruang	170.508.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
107	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SD NEGERI 004 KARIMUN	1	Ruang	271.823.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
108	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SD NEGERI 008 KARIMUN	1	Ruang	271.823.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
109	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 1 KARIMUN	1	Ruang	218.644.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
110	Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 3 KARIMUN	1	Ruang	125.043.500	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
111	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 3 KARIMUN	1	Ruang	273.927.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
112	Rehabilitasi ruang bahtash dengan tingkat kerusakan minimal sedang, SMP NEGERI 1 KARIMUN	1	Ruang	85.279.500	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
113	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SMP NEGERI 3 KARIMUN	2	Ruang	614.005.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
114	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMP NEGERI 3 KARIMUN	1	Ruang	391.622.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
115	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya, SMP NEGERI 3 KARIMUN	1	Ruang	296.971.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
116	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot, SMP NEGERI 1 KARIMUN	1	Unit	219.897.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
117	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 1 KARIMUN	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
118	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 3 KARIMUN	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
119	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SLB YPBK KARIMUN	1	Paket	70.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Karimun	Terealisasi
120	Pembangunan ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 004 BELAT	1	Ruang	271.823.001	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Belat	Terealisasi
121	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 003 BURU	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Buru	Terealisasi
122	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 003 MERAL	4	Ruang	758.282.132	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Meral	Terealisasi
123	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SD NEGERI 003 MERAL	5	Ruang	2.718.230.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Meral	Terealisasi
124	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SD NEGERI 013 MORO	3	Ruang	502.483.893	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
125	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, SD NEGERI 013 MORO	1	Paket	102.928.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
126	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SD NEGERI 013 MORO	1	Ruang	271.823.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
127	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 013 MORO	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
128	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 002 MORO	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
129	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 018 MORO	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
130	Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMP NEGERI 2 MORO	2	Unit	228.467.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
131	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SMP NEGERI 2 MORO	2	Ruang	614.005.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
132	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMP NEGERI 2 MORO	1	Ruang	391.622.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
133	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya, SMP NEGERI 2 MORO	1	Ruang	296.971.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
134	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 2 MORO	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Moro	Terealisasi
135	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 KARIMUN	5	Ruang	1.237.080.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tebing	Terealisasi
136	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 KARIMUN	1	Ruang	333.500.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tebing	Terealisasi
137	Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 KARIMUN	1	Ruang	330.500.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tebing	Terealisasi
138	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, SMAN 1 KARIMUN	1	Ruang	475.042.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tebing	Terealisasi
139	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya, SMAN 1 KARIMUN	1	Ruang	709.864.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tebing	Terealisasi
140	Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya, SMAN 1 KARIMUN	1	Ruang	473.042.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tebing	Terealisasi
141	Pengadaan Layanan Primer-Prasarana	1	Paket	70.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Tebing	Terealisasi
142	Normalisasi Runway Strip dan Pembuatan Drainase sisi utara - Bandara Letung - Anambas	1	Paket	25.000.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan	Kepulauan Anambas	Terealisasi
143	Revitalisasi PLT EBT	1	Unit	4.100.000.000	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepulauan Anambas (Siantan)	Terealisasi
144	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMK	72	Orang	362.566.000	DAK	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Meningkat	Kepulauan Anambas	Terealisasi
145	DAK Bidang Kelautan Perikanan	1	Paket	4.988.919.000	DAK	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kepulauan Anambas	Terealisasi
146	Rehabilitasi ruang toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, SDN 008 AIR BIRU	1	Paket	144.159.600	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
147	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SDN 008 AIR BIRU	1	Ruang	200.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
148	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SDN 008 AIR BIRU	1	Ruang	464.600.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
149	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya, SDN 008 AIR BIRU	1	Unit	378.252.200	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
150	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SDN 005 LEMBAH REWAK	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
151	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMPN 1 JEMAJA	1	Ruang	645.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
152	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMPN 2 LEMBAH REWAK	1	Ruang	554.762.100	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
153	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot, SMPN 1 JEMAJA	1	Unit	340.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
154	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot, SMPN 2 LEMBAH REWAK	1	Unit	340.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
155	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SMPN 1 JEMAJA	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja	Terealisasi
156	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.566.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja	Terealisasi
157	Pengadaan Layanan Primer-Prasarana	1	Paket	683.631.300	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja	Terealisasi
158	Pengadaan Layanan Primer-Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu	1	Paket	263.985.106	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja	Terealisasi
159	Pengadaan Layanan Primer-Peralatan Puskesmas Pembantu	1	Paket	75.500.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja	Terealisasi
160	Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SDN 002 ULU MARAS	1	Ruang	200.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja Timur	Terealisasi
161	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SDN 002 ULU MARAS	1	Ruang	446.200.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja Timur	Terealisasi
162	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SDN 004 GENTING PULUR	1	Ruang	446.200.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja Timur	Terealisasi
163	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SDN 002 ULU MARAS	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Jemaja Timur	Terealisasi
164	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.566.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja Timur	Terealisasi
165	Pengadaan Layanan Primer-Cold Storage (freezer) limbah medis	1	Unit	12.300.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja Timur	Terealisasi
166	Penyediaan Alat Surveilans Gizi-Sanitarikit	1	Kit	99.950.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja Barat	Terealisasi
167	Pengadaan Layanan Primer-Sarana	1	Paket	1.000.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Jemaja Barat	Terealisasi
168	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMPN 2 PIABUNG	1	Ruang	650.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
169	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya, SMPN 2 PIABUNG	1	Ruang	520.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
170	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya, SMPN 2 PIABUNG	1	Ruang	330.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
171	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabot, SMPN 2 PIABUNG	1	Unit	350.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
172	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 1 PALMATAK	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
173	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 2 PIABUNG	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
174	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 PALMATAK	1	Ruang	250.147.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
175	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 PALMATAK	1	Ruang	333.500.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
176	Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 PALMATAK	1	Ruang	258.147.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
177	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMAN 1 PALMATAK	1	Ruang	406.579.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
178	Pengadaan peralatan pendidikan IPA, SMAN 1 PALMATAK	1	Paket	93.150.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Palmatak	Terealisasi
179	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.566.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Palmatak	Terealisasi
180	Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya, TK NEGERI PEMBINA	1	Ruang	315.901.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Siantan	Terealisasi
181	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 2 SIANTRAN	1	Paket	56.925.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Siantan	Terealisasi
182	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SMPN 2 SIANTRAN	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Siantan	Terealisasi
183	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termperatur Logger	1	Unit	4.566.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan	Terealisasi
184	Penyediaan Alat Surveilans Gizi-Sanitarikit	1	Kit	99.950.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan	Terealisasi
185	Peningkatan Labkkes Prov/Kab/Kota/Sarana & Prasarana (Pembangunan Baru)	1	Paket	5.000.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan	Terealisasi

186	Pengadaan Sarana Transportasi Darat Desa Tiangau, Siantan Selatan	3	Unit	1.276.395.000	DAK	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Siantan Selatan	Terealisasi
187	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap-Termometer Logger	1	Unit	4.566.200	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan Selatan	Terealisasi
188	Pengadaan Layanan Primer-Prsesara	1	Paket	760.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan Selatan	Terealisasi
189	Pengadaan Layanan Primer-Cold Storage (freezer) limbah medis	1	Unit	12.300.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan Selatan	Terealisasi
190	Penyediaan Alat Surveilans Gizi-Sanitarikit	1	Kit	99.950.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan Utara	Terealisasi
191	Pengadaan Layanan Primer-Sarana	1	Paket	1.000.000.000	DAK	Kementerian Kesehatan	Siantan Utara	Terealisasi
192	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	4	Ruang	993.884.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
193	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	279.444.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
194	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya, SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	296.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
195	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	2	Ruang	455.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
196	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	2	Ruang	455.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
197	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	325.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
198	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	325.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
199	Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	325.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
200	Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	300.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
201	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	1.500.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
202	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Perhotelan, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	1.600.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
203	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya - KK Tata Boga, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	1.600.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
204	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	220.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
205	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	84.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
206	Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	200.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
207	Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	525.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
208	Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	525.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
209	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	375.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
210	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	355.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
211	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Ruang	180.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
212	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
213	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
214	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Nautika Kapal Penangkap ikan, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	3.061.961.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
215	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	1.500.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
216	Pengadaan peralatan praktik utama - KK Perhotelan, SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	1	Paket	1.500.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Bunguran Timur	Terealisasi
217	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, SD NEGERI 001 ARUNG AYAM	1	Ruang	304.569.223	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Serasan Timur	Terealisasi
218	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, SD NEGERI 001 ARUNG AYAM	1	Ruang	305.551.107	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Serasan Timur	Terealisasi
219	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SD NEGERI 001 ARUNG AYAM	1	Paket	100.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Serasan Timur	Terealisasi
220	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 SUBI	4	Ruang	993.884.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Subi	Terealisasi
221	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya, SMAN 1 SUBI	1	Ruang	95.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Subi	Terealisasi
222	Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMAN 1 SUBI	1	Ruang	180.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Subi	Terealisasi
223	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya, SMAN 1 SUBI	1	Ruang	253.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Subi	Terealisasi
224	Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya, SMAN 1 SUBI	1	Ruang	253.000.000	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Subi	Terealisasi



LAMPIRAN

MATRIKS CAPAIAN KERJASAMA PERBATASAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024

**Daftar Rencana dan Capaian Kerjasama Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kepulauan Riau Tahun 2024**

No.	Bidang Kerjasama	Pembahasan Lanjutan	Realisasi	Persentase (%) Realisasi
1	Kesehatan	8	2	25
2	Pendidikan	3	5	167
3	Kesenian/Kebudayaan	1	6	600
4	Pemuda dan Olahraga	5	5	100
5	Industri dan Perdagangan	9	2	22
6	Pertanian dan Peternakan	4	1	25
7	Pelancongan / Pariwisata	4	1	25
8	Keselamatan dan Pengurusan Sempadan	10	4	40
Total		44	26	59,09

DAFTAR RENCANA DAN CAPAIAN KERJASAMA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

TAHUN 2024

No.	NAMA KERJASAMA	SCOPE	KESEPAKATAN/ BENEFIT	DURASI		LEADING SEKTOR	KERTAS KERJA	STATUS
				AWAL	AKHIR			
	<i>Kesehatan / Kesihatan</i>							
1.	<i>in house training...</i>	<i>Kepri-johor-malaka</i>	-	-	-	<i>Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan</i>	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>membangunkan sistem pertukaran data dan informasi untuk memastikan pasien / pesakit yang masuk ke rumah sakit / hospital dengan riwayat / sejarah penyakit menular / berjangkit dan berpotensi wabah / wabak mendapatkan layanan / rawatan sampai sembuh / sehingga pulih</i>	<i>Kepri-Riau-Johor-Malaka</i>	-	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
3.	<i>Pihak Provinsi KEPRI mengusulkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan / rawatan kesihatan bagi migran / pekerja asing Indonesia yang menetap atau yang dipulangkan ke</i>	<i>Kepri-Riau-Johor-Malaka</i>	-	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>negara asal, sesuai dengan standar / standard provinsi / negeri masing-masing</i>							
4.	<i>Pihak Provinsi KEPRI mengusulkan program standar / standard bersama bagi penurunan kadar Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan tumbesaran stunting / terbantut</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Melaka bercadang menganjurkan Melaka Public Health Conference 1st International Sosek Malindo. Dijangka akan diadakan pada bulan Mei atau Jun 2025.</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
5.	<i>Penyusunan standar Operastional Prosedur (SOP) secara bersama dalam / untuk mempermudah dan mempesingkat / mempercepatkan proses pemulangan / penghantaran jenazah yang meninggal di negara masing-masing atau dalam perjalanan, serta mencegah penipuan / fraud terkait hal-hal yang dapat merugikan keluarga jenazah</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>1. Pihak Johor/Melaka berkomitmen untuk mempermudah pemulangan jenazah dari Johor/Melaka ke Riau/Kepri; 2. Masing-masing Pihak membentuk Tim Fasilitasi/call center pemulangan jenazah; 3. Pihak Johor/Melaka diminta untuk dapat memberikan gambaran rincian biaya minimal terkait pemulangan jenazah oleh agensi</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
6.	<i>duty free economic zone,</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>lebih fokus kepada menjaga hubungan baik dengan pihak kesihatan dari Indonesia melalui kerjasama kemudahan rujukan pesakit, perkongsian kemahiran serta maklumat</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>

			<i>teknologi baru bersama Hospital kerajaan & swasta, NGO serta persatuan-persatuan di Riau & KEPRI. Selain itu, Usaha untuk menambahbaik sistem aktiviti kesihatan dengan membuka 10 cawangan pejabat perwakilan di beberapa kawasan Pekanbaru, Bengkalis, Batam, Aceh Selain itu, terdapat beberapa pemain industri lain juga aktif memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik : 1. Regency Specialist Hospital 2. Gleneagles Hospital Medini Johor</i>					
7.	<i>setiap pekerja / tenaga kerja asing atau spesialis / doktor pakar dari negara asing harus melalui izin / ijin dari Kementerian Kesehatan / kesihatan Republik Indonesia</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Melaka / Johor memaklumi bahawa / memaklumkan bahawa perekrutan / pengambilan setiap pekerja / tenaga kerja asing atau spesialis / doktor pakar dari negara asing adalah sesuai / mengikut dengan ASEAN mutual Recognition Arrangement (MRA).</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
<i>Usulan Baru</i>								
1.	<i>pembentukan Sister Hospital antara Rumah Sakit di Provinsi Riau dan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	-	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>Johor/Malaka dalam bentuk operasi bersama (joint operation) antara tenaga medis spesialis, transfer ilmu (knowledge), pengembangan layanan unggulan</i>							
2.	<i>kerja sama bagi penempatan tenaga kerja formal di bidang Keperawatan antara keempat-empat belah pihak</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	-	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
4.	<i>Teacher Exchange Program yang memberikan peluang bagi tenaga pendidik untuk saling bertukar pengalaman dan best practice dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	-	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
	Pendidikan							
1.	<i>kerjasama pertukaran pelajar antara / antar Sekolah Menengah</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan calon mitra terkait di Melaka dan Johor,</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>

	<i>Vokasional / Kejuruan dan Kolej / Perguruan Tinggi di Provinsi Riau / KEPRI dan akan melakukan praktik / praktikal saling bertukar informasi, / perkongsian maklumat terkait / berkaitan kurikulum pembelajaran / pelajaran di negara masing-masing.</i>						
2.	<i>Program Perkongsian Amalan Terbaik / Community Program Perbatasan dan pertukaran informasi / maklumat pendidikan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Program Perkongsian Amalan Terbaik dapat diakses melalui Youtube GemaDigitalTVMelaka yang terkandung di dalamnya resensi buku, perkongsian amalan terbaik dan rakaman majlis di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia hasil inisiatif JPN Melaka. Informasi pendidikan di Malaysia boleh diakses melalui laman sesawang www.moe.gov.my bagi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau https://jpnmelaka.moe.gov.my (JPN Melaka)</i>	-	-	1 Sosial Budaya	disepakati
3.	<i>program wisata / pelancongan pendidikan berkenaan dengan Revitalisasi Sejarah Melayu</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	1 Sosial Budaya	disepakati

	<i>Singapura – Johor – Riau (SIJORI)</i>							
4.	<i>program beasiswa / biasiswa bagi pelajar Kepri</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
5.	<i>pelaksanaan praktikal / magang ke Melaka / Johor di bidang perhotelan dan pembuatan / pariwisata dan manufaktur</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Melaksanakan penjajakan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dengan Malaysia Association of Hotel (MAH) negeri Johor dan MAH Negeri Melaka untuk melaksanakan program magang / praktek kerja lapangan bagi siswa SMK Perhotelan dan program magang /praktek kerja lapangan bagi Mahasiswa perhotelan Provinsi Riau</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
<i>Usulan Baru</i>								
1.	<i>Student Exchange Program dengan fokus kegiatan untuk memperkuat semangat persaudaraan serumpun melayu bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam bidang kebudayaan, bahasa, serta kuliner</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	-	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>pengembangan kurikulum kearifan lokal Riau, Melaka dan Johor bagi guru agar dapat melestarikan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	-	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>kearifan lokal sebagai warisan leluhur</i>							
3.	<i>diadakannya kompetisi sains dan olahraga tahunan untuk memupuk kebersamaan agar lebih mengembangkan potensi serta bakat siswa</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	-	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
Kesenian dan Kebudayaan								
1.	<i>program / kegiatan Kesenian dan Kebudayaan antara keempat-empat negeri / provinsi diteruskan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<p><i>1. Pameran, Demonstrasi & Cuba Rasa Sajian Warisan 3 Negara;</i></p> <p><i>2. Pengenalan Permainan Tradisional 3 Negara;</i></p> <p><i>3. Pameran & Demonstrasi Seni Visual 3 Negara;</i></p> <p><i>4. Pembelajaran Asas Tarian 3 Negara;</i></p> <p><i>5. Persembahan Silang Budaya 3 Negara.</i></p>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
2.	<i>mengadakan kegiatan / program kunjungan muhibah sejarah Melayu setahun sekali yang diikuti / disertai oleh kedua-dua belah pihak</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Kerajaan Negeri Melaka mengambil maklum dengan perkara ini di mana program / kegiatan kunjungan muhibah sejarah Melayu boleh dilaksanakan pada setiap tahun di mana Melaka menganjurkan Sambutan Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO pada setiap bulan Julai dengan pelbagai</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>

			<i>pengisian program / kegiatan yang boleh disertai</i>					
3.	<i>festival Budaya / Gelar Budaya Serumpun dilaksanakan secara tahunan, dan disertai dengan program kemasyarakatan sempadan / perbatasan diikuti dengan pertukaran artis / budayawan dan seniman</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<p><i>1. Pameran, Demonstrasi & Cuba Rasa Sajian Warisan 3 Negara;</i></p> <p><i>2. Pengenalan Permainan Tradisional 3 Negara;</i></p> <p><i>3. Pameran & Demonstrasi Seni Visual 3 Negara;</i></p> <p><i>4. Pembelajaran Asas Tarian 3 Negara;</i></p> <p><i>5. Persembahan Silang Budaya 3 Negara</i></p>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
4.	<i>Simposium Kebudayaan dan Olah raga / Sukan Persahabatan yang dilaksanakan pada kegiatan / program kunjungan napak tilas / muhibah</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Negeri Melaka memaklumkan bahawa sukan persabahan telah mula diadakan sempena SOSEK MALINDO bermula pada persidangan ke-17 di Johor</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
5.	<i>mengadakan dialog udara / bicara radio berkenaan dengan isu terkini / semasa kedua / kedua-dua negara yang disesuaikan dengan keperluan, dan format dialog / interview adalah secara langsung / live dan durasi / tempoh 15 menit / minit</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Bicara antara dua negara diuruskan di peringkat Bahagian Berita Hal Ehwal Semasa, Jabatan Penyiaran Malaysia</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>

6.	<i>Seminar Budaya Melayu dan Festival Seni Budaya dapat dilakukan secara bergiliran / bergilir pada pelaksanaan Pertemuan Sosek Malindo</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>mengadakan perbincangan bersama pihak Bahagian Promosi Pelancongan seterusnya mengangkat usul cadangan penganjuran seminar Budaya Melayu dan Festival Seni Budaya kepada Kerajaan Negeri Melaka</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
	<i>Usulan Baru</i>							
1.	<i>kegiatan silang budaya dibulan Agustus sebagai rangkaian perayaan kemerdekaan kedua negara. Kegiatan tersebut mencakup pertukaran murid dan pengajar seni tari/budaya dari sekolah dasar/menengah keempat belah pihak dengan puncak kegiatan penampilan kegiatan dari murid seni/budaya daerah Riau/KEPRI dan seni tari/budaya Johor/Melaka</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	-	-	-	-	<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>Belum disepakati</i>
	<i>Pemuda dan Olahraga / Belia dan Sukan</i>							
1.	<i>Pertukaran Belia / Pemuda antara Riau. KEPRI, Johor dan Melaka secara rutin setiap tahun</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>pihak Melaka dan Johor akan berkerjasama dengan Majlis Gabungan Belia Melaka dan Majlis Belia Negeri Johor dalam perlaksanaan program tersebut</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>

2.	<i>Festival Pemuda / Belia dengan perbagai acara pertandingan / lomba setiap tahun dengan tuan rumah diadakan / diatur secara bergiliran / bergilir</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<p>1. Pertandingan / Lomba Menyanyi / Vocal</p> <p>2. Pertandingan / Lomba Teknologi Informasi Perangkat Lunak (Software)</p> <p>3. Pertandingan / Lomba Teknologi Informasi Perangkat Keras (Hardware)</p> <p>4. Pertandingan / Lomba Kraftangan / Kriya / Kerajinan</p> <p>5. Pertandingan / Lomba Fashion (Desain Busana)/ Reka Fresyen</p> <p>6. Pertandingan / Lomba Carnaval./ Karnival Budaya</p>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
3.	<i>Dialog Pemuda / Belia Antara Negara</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pelaksanaan Dialog Pemuda / Belia Antara Negara untuk diadakan secara dalam jaringan / talian</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
4.	<i>dilaksanakan bengkel / workshop pengembangan / pemantapan kewirausahaan / keusahawanan pemuda / belia secara bersama</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Negeri Melaka / Johor menyambut baik cadangan bengkel pemantapan dan pengembangan keusahawanan belia serta kejohanan sukan antara Riau, KEPRI, Johor dan Melaka pada bagi mewujudkan jalinan hubungan yang lebih muhibbah antara dua negara terutamanya dalam aspek pembangunan belia</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>

5.	<i>pelaksanaan kejuaraan / kejohanan olahraga / sukan antara keempat belah pihak</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini telah pernah diusulkan dan dilaksanakan di dalam SOSEK MALINDO</i>	-	-		<i>1 Sosial Budaya</i>	<i>disepakati</i>
<i>Industri dan Perdagangan</i>								
1.	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan (PMK 80 Tahun 2019)</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perdagangan Perbatasan sesuai dengan peraturan</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Disepakati</i>
2.	<i>daftar barang / senarai daftar barang di bawah Barter Trade Agreement untuk dibincangkan di forum SOSEK MALINDO.</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Hal ini bertujuan untuk lebih mengedepankan / mempercepat Implementasi / pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN Economic Community (AEC)</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
3.	<i>kerjasama pengembangan / pembangunan koperasi (bahan baku / bahan mentah, hilirisasi / hiliran, digitalisasi / teknologi digital, produk halal, promosi dan pengembangan / pembangunan ekspor / eksport)</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>menyediakan pelayanan / perkhidmatan keahlian / kepakaran dalam kemasan / pembungkusan produk PMKS / UMKM / IKM</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>disepakati</i>
4.	<i>mengembangkan kerjasama kota kembar / bandar berkembar antar / antara Pemerintah Daerah (Negeri / Daerah) / (Kabupaten / Kota) dengan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Melaka / Johor memohon pihak Riau / KEPRI mengemukakan / mengusulkan cadangan kertas kerja / proposal terperinci / detil bagi pertimbangan</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>mitra sesama / rakan kongsi Pemerintah Daerah di wilayah Melaka /Johor. Dalam hal ini Pihak Riau menawarkan Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.</i>		<i>Kerajaan Negeri Johor dan Melaka</i>					
	<i>Usulan Baru</i>							
1.	<i>kerjasama penyelenggaraan business matching, promosi dan pemasaran produk Usaha Kecil Mengengah (UKM) antar wilayah Riau – KEPRI– Johor – Melaka</i>	Kepri-Riau- Johor- Malaka	<i>Melaka/Johor menyetujui usulan ini dan akan memaklumkan pada pertemuan yang akan datang</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>kerja sama pertukaran informasi dan penyamaan persepsi terkait klasifikasi produk, contoh untuk produk daun kelor di Indonesia dikategorikan sebagai produk herbal sedang di Malaysia dikategorikan sebagai obat.</i>	Kepri-Riau- Johor- Malaka	<i>Melaka/Johor menyetujui usulan ini dan akan memaklumkan pada pertemuan yang akan datang</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
3.	<i>penambahan Bidang Baru dalam forum Pertemuan Tim Teknis yaitu Bidang IV untuk mengakomodir/melibatkan dunia usaha (semacam Joint Business Council dengan keanggotaan dari unsur kamar dagang</i>	Kepri-Riau- Johor- Malaka	<i>Melaka/Johor menyetujui usulan ini dan akan memaklumkan pada pertemuan yang akan datang</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>(chambers of commerce), asosiasi usaha, Badan Usaha Milik Daerah/ BUMD maupun individu), dalam upaya menjadikan kerja sama Sosek Malindo dapat bertransformasi pada kegiatan-kegiatan konkret dalam meningkatkan interaksi ekonomi, baik disektor perdagangan, pariwisata maupun investasi antar keempat wilayah.</i>						
4.	<i>mengusulkan dibentuknya Forum Bisnis Dunia Usaha Sosek Malindo yang akan berperan sebagai wadah saling tukar informasi dan peluang usaha yang diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan transaksi dan aktivitas perekonomian dalam kawasan Sosek Malindo</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Johor menyarankan agar diadakan pertemuan terlebih dahulu antara pihak KADIN Riau, KADIN Kepulauan Riau, Melaka Corporation (Mcorp) Melaka dan Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd (PUJB) terkait untuk membahas usulan ini</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i> Belum disepakati
5.	<i>mewujudkan saluran pemudah cara bagi usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) Johor untuk mengeksport barang tempatan ke pasaran Indonesia</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Johor mengusulkan / mencadangkan menyediakan kepakaran dalam pembungkusan produk kepada Indonesia untuk memasarkan produk di Malaysia</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i> Belum disepakati

6.	<i>diadakannya kerja sama secara resmi terkait dengan perdagangan bahan baku/mentah dan atau hasil produk perikanan antara KEPRI dan Johor dengan melibatkan pihak swasta terkait</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Johor meminta pihak KEPRI untuk menyampaikan usulan ini lebih terperinci</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
7.	<i>membuat video promosi bersama dan menampilkan logo SOSEK MALINDO dalam produknya, dimana keempat-empat belah pihak dapat menampilkan produk dan pariwisata unggulan (champion product) masing-masing.</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Untuk kepentingan ini ditetapkan narahubung/PIC dari masing-masing belah pihak</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
<i>Pertanian dan Peternakan</i>								
1.	<i>meninjaukan / memaklumkan bahwa / bahawa dalam pengiriman / penghantaran barang komoditi pertanian dari Malaysia ke KEPRI agar menyertakan Sijil / Sertifikasi Barang sesuai yang disyaratkan oleh Pihak Karantina Indonesia</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Protokol kemasukan komoditi pertanian bagi import dan eksport ke KEPRI adalah tertakluk di bawah peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa (MAQIS).</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>disepakati</i>
2.	<i>membuka peluang pelaburan / investasi industri hulu dan hilir (derivative industry)</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Jabatan Pertanian Negeri Johor telah mendapatkan respon dari pemain industry dan mendapat permintaan</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>komoditas / komoditi keladi / talas ungu dan nenas</i>		<i>dan keperluan bagi komoditi keladi / talas ungu agak rendah</i>				<i>Dan Perhubungan</i>	
3.	<i>pihak Melaka / Johor memberikan informasi / maklumat tentang keperluan / kebutuhan komoditas / komoditi pertanian beserta syarat / persyaratan mutunya.</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>MAQIS adalah agensi pengeluar permit bagi konsainan pertanian, perikanan dan veterinar. Namun syarat bagi setiap konsainan ini memerlukan permit atau tidak adalah ditentukan oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Veterinar dan Lembaga Kemajuan Malaysia (LKIM)</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
4.	<i>peningkatan / penambahbaikan agar kualitas / kualiti kelapa tua biji yang disediakan / dibekalkan oleh pihak Riau / KEPRI dapat ditingkatkan kualitas / kualiti, lebih segar dan bebas hama / perosak serta penyakit bagi kegunaan / penggunaan pabrik-pabrik / pengilang-pengilang santan kelapa Negeri Johor</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Johor turut mengusulkan / mencadangkan menganjurkan / diadakan pertemuan / perjumpaan atau kunjungan / lawatan ke Indonesia antara pemain / pengusaha industri dari Riau / KEPRI bersama pihak berkepentingan / berminat di Negeri Johor</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
<i>Usulan Baru</i>								
1.	<i>langkah penambahbaikan agar kualiti kelapa tua biji yang dibekalkan oleh pihak Riau / KEPRI dapat</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Johor mengusulkan / mencadangkan menganjurkan perjumpaan atau lawatan ke Indonesia antara pemain</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>ditingkatkan kualiti, lebih segar dan bebas perosak serta penyakit bagi kegunaan pengilang-pengilang santan kelapa Negeri Johor</i>		<i>industri dari pihak Riau / KEPRI bersama pihak berkepentingan di Negeri Johor bagi membincangkan isu berkaitan, mencapai kesepakatan bersama, mewujudkan persefahaman yang harmoni bagi mencapai situasi menang-menang di kalangan mereka dalam membekalkan kelapa tua biji</i>				<i>Dan Perhubungan</i>	
	Pelaburan dan Industri / Investasi							
1.	<i>diadakannya joint promotion dan kerja sama antara Kawasan Free Trade Zone KEPRI dengan Kawasan Iskandar Malaysia</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Keempat-empat pihak setuju / bersetuju memaklumi / mengambil maklum berkaitan / terkait usul / perkara tersebut berada di luar bidang kuasa negeri / kewenangan Provinsi</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>Business Forum/Meeting antara Pengusaha KEPRI dan Malaysia</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Kerajaan Negeri Melaka telah menyertai Batam Tourism Expo 2024 bermula pada 24-29 Mei 2024 di Batam</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
	Pelancongan / Pariwisata							
1.	<i>membawa wisatawan / pelancong ke destinasi atau destinasi tujuan wisata / pelancongan utama unggulan di masing-masing Negara</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>melakukan promosi destinasi atau tujuan destinasi wisata unggulan / pelancongan utama masing-masing Negara melalui promosi iklan / media cetak dan elektronik</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>

2.	<i>mengadakan promosi dan pameran pariwisata / pelancongan bersama terkait Pariwisata / berkaitan pelancongan dengan melibatkan agent atau travel masing-masing negara dan instansi terkait / agensi berkaitan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Tourism Johor telah menganjurkan "Welcome to Johor Expo 2024" yang telah diadakan pada 18 hingga 21 Julai di Grand Batam Mall yang disertai oleh 14 pemain industri pelancongan yang terdiri daripada hospital, klinik, ejen pelancongan, dan wakil² persatuan</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
3.	<i>kerjasama promosi pariwisata / pelancongan antara Riau dan Melaka/Johor melalui pemasangan media promosi luar / luar ruang (outdoor promotion media/devices) seperti billboard / baliho dan media sosial di masing-masing wilayah sekaligus memberikan kemudahan pengurusan dan kelulusan / perizinan pemasangan media promosi di wilayah masing-masing</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>tertakluk / taat kepada peraturan Pihak Berwenang / Berkuasa dan bayaran yang dikenakan oleh Perusahaan pengiklanan/ syarikat pengendali iklan</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
<i>Usulan Baru</i>								
1.	<i>pemberian spesial rate / diskon hotel bagi pemegang KTP/ID Riau-Kepulauan Riau-Johor-Melaka dalam rangka meningkatkan kunjungan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Johor / Melaka mengusulkan keempat pihak untuk mengadakan perbincangan bersama syarikat tempahan hotel atas talian seperti Booking.com dan Agoda bagi</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>wisatawan antar keempat wilayah sekaligus penguatan peran dan kontribusi kerjasama Sosek Malindo dalam membangkitkan aktifitas ekonomi terutama di bidang pariwisata</i>		<i>memperkenalkan promosi bulan SOSEK MALINDO kepada pengunjung di empat wilayah dengan potongan harga</i>					
2.	<i>Johor / Melaka mengusulan keempat pihak untuk mengadakan perbincangan bersama syarikat tempahan hotel atas talian seperti Booking.com dan Agoda bagi memperkenalkan promosi bulan SOSEK MALINDO kepada pengunjung di empat wilayah dengan potongan harga</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini berada dibawah urusan bidang 3</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>disepakati</i>
<i>Perhubungan</i>								
1.	<i>dibukanya Lintas / pembukaan laluan Kapal Penyebarangan / menyeberang antara KEPRI dan Johor</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Keempat-empat pihak setuju / bersetuju memaklumi / mengambil maklum terkait / berkaitan usul / perkara tersebut berada di luar bidang kewenangan Provinsi / kuasa negeri</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>Perlu dilakukannya / mengadakan pertemuan lanjut / lanjutan antara instansi terkait / agensi</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Johor bersetuju dan mengambil maklum bahawa perkara ini tidak dibahas di platform ini sehingga ada</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>berkaitan dan pihak berwenang / pihak berkuasa untuk mensukseskan / menjayakan pembukaan jalur Lintas Kapal Penyebarangan / laluan kapal menyeberangi antara kedua-dua belah pada tingkat / peringkat persekutuan yang lebih tinggi</i>		<i>keputusan dasar di peringkat pusat / Persekutuan berkenaan hal ini.</i>				<i>Dan Perhubungan</i>	
3.	<i>dibentuk tim bersama / kumpulan untuk menyusun / mengkaji / merumuskan peraturan / regulasi mengenai had / batasan kenderaan / kendaraan yang dapat keluar masuk menyeberangi / Penyeberangan Ro-Ro (Roll on – Roll off) Dumai-Melaka</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Johor bersetuju dan mengambil maklum bahawa perkara ini tidak dibahas di platform ini sehingga ada keputusan dasar di peringkat pusat / Persekutuan berkenaan hal ini</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
4.	<i>mewujudkan laluan penerbangan Pekan Baru – Melaka</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Penerbangan terus dua hala Melaka – Pekanbaru dikendalikan oleh Batik Air (dahulunya dikenali sebagai Malindo Air) telah diperkenalkan semula selepas pandemik bagi tempoh 12 September 2022 hingga 7 Mei 2023</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
	<i>Usulan Baru</i>							

1.	<i>Pihak Riau tetap mengusulkan untuk membahas pelaksanaan penyeberangan Roro Dumai-Malaka dan membentuk task force penyeberangan Roro Dumai-Malaka untuk menyusun regulasi dan mempermudah koordinasi dalam rangka</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Melaka menyambut baik usul ini dan bersiap sedia untuk perbincangan selanjutnya</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
<i>Sumber Manusia / Ketenagakerjaan</i>								
1.	<i>tim khusus / membentuk kumpulan melibatkan keempat pihak untuk menfasilitasi / memudah cara perlindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan pekerja Migran Indonesia</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Melaka / Johor berpendapat /berpandangan usul / perkara ini berada di luar bidang kewenangan / kuasa negeri</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>pertukaran informasi di bidang sumber manusia / ketenaga kerjaan. Dalam hal ini Pihak Melaka / Johor memberikan informasi / maklumat tentang permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan / diperlukan di Melaka / Johor, sebaliknya Pihak Riau memberikan informasi / maklumat tentang ketersediaan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Keempat-empat pihak setuju / bersetuju memaklumi / mengambil maklum berkaitan / terkait usul / perkara tersebut berada di luar bidang kewenangan Provinsi / kuasa negeri</i>	-	-	-	<i>2 Bidang Ekonomi, Perdagangan Dan Perhubungan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>tenaga kerja yang bersertifikasi / berkelayakan</i>							
	Keselamatan dan Pengurusan Sempadan							
1.	<i>Pihak Melaka / Johor mengusulkan / mencadangkan supaya pihak Riau / KEPRI boleh mendapatkan informasi / maklumat segera senarai / daftar penceramah agama yang disenarai hitam melalui Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru, Johor termasuk saling bertukar informasi / berkongsi maklumat mengenai "Foreign Terrorist Fighter" dari menyebar / merebak di kawasan ini setelah permintaan informasi / permohonan maklumat tersebut diedarkan lebih awal ke Polis Diraja Malaysia (PDRM), Bukit Aman, Kuala Lumpur dan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Keempat-empat belah pihak setuju / bersetuju dan menginformasikan / memaklumkan bahwa / bahawa kerjasama di antara kedua-dua belah negara selalu berlanjutan / sentiasa berterusan dari segi pertukaran informasi / perkongsian maklumat, penegakan hukum / penguatkuasaan serta memberi daftar / senarai penceramah agama yang masuk daftar hitam / disenarai hitam dan akan dikoordinasikan / diselaraskan kepada pihak yang berwenang / berkenaan (Kepolisian Republik Indonesia)</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>pertukaran informasi / maklumat antara agensi keselamatan / instansi</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, menginformasikan /</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>Melaka / Johor dengan Kepolisian Daerah Riau / Kepulauan Riau terkait / berkaitan kasus / kes-kes Penyeludupan Narkoba / Dadah, Senjata Api, Rokok dan Minuman Keras</i>		<i>memaklumkan kerjasama dalam hal-hal penyeludupan narkoba / dadah dilakukan secara resmi / rasmi melalui Perhubungan Antarabangsa Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Bukit Aman dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Walau bagaimanapun, perkongsian maklumat secara informal juga akan diteruskan bagi menangani isu-isu narkoba / dadah secara adhoc</i>				<i>Pengurusan Sempadan</i>	
3.	<i>pencegahan perdagangan manusia / pemerdagangan orang dengan cara pertukaran informasi / maklumat antara agensi penguatkuasaan negara terlibat / instansi penegak hukum yang berwenang, patroli / rondaan bersama dengan lebih sering dan hukuman tegas / keras kepada pelaku sindikat terlibat / ahli sindiket terbabit</i>	Kepri-Riau- Johor- Malaka	<i>Pihak Melaka / Johor telah menginformasikan bahwa / memaklumkan bahawa patroli laut / rondaan maritim bersama pihak Indonesia yang dikenal/i sebagai Maritime Border Patrol Coordinating Group (MBPCG) telah bekerjasama dalam menjaga kawasan perairan sempadan antara kedua-dua buah negara. Hasil kerjasama yang baik antara PDRM dengan POLRI, tiada laporan mengenai masuknya pendatang ilegal / kemasukan imigran secara ilegal / haram dalam jumlah besar / menggunakan kapal / bot</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>disepakati</i>

4.	<i>kerjasama / pertukaran informasi / perkongsian maklumat tentang pencegahan tindak pidana /jenayah perdagangan manusia / pemerdagangan orang melalui Kepolisian / Polis masing-masing</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak PDRM pihak sememangnya sentiasa memberikan kerjasama dalam perkongsian maklumat dan aktiviti pencegahan pemerdagangan manusia. Oleh itu, dicadangkan agar usul ini digugurkan</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>disepakati</i>
5.	<i>isu-isu penyeludupan dan perdagangan manusia / pemerdagangan orang diangkat ke tingkat / peringkat yang lebih tinggi untuk penyelesaian yang lebih efektif / berkesan. Pihak Melaka / Johor perlu mengangkat perkara ini ke tingkat / peringkat Kerajaan Pusat manakala pihak Riau / Kepulauan Riau perlu mengangkat ke Jakarta. Antara pendekatan yang boleh diusulkan / dicadangkan adalah penggunaan teknologi tinggi seperti radar dan satelit yang lebih canggih dan juga penggunaan kapal-kapal penegakan hukum / bot-bot penguatkuasaan yang lebih cepat / laju</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Melaka / Johor memperluas penggunaan teknologi tinggi, pihak penguatkuasa / aparat penegak hukum Malaysia menggunakan sistem pengawasan maritim yang beroperasi 24 jam bagi memantau aktiviti maritim</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>disepakati</i>

6.	<i>pengawasan bersama terhadap aktivitas / aktiviti perdagangan ilegal di kawasan perbatasan masing-masing negara</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<p>Pihak APMM telah melaksanakan pengawasan bersama dengan pihak berkuasa Indonesia melalui Operasi Patroli Terkoordinasi Operasi. Tindakan Maritim Malaysia Indonesia (OP PATKOR OPTIMA MALINDO) Siri 31A/2024 pada 04 hingga 13 Jun 2024 di Perairan Selat Melaka yang diselaraskan oleh jawatankuasa Coordinate Operation Control Committee (COCC)</p> <p>OP PATKOR OPTIMA MALINDO Siri 31B/2024 telah dilaksanakan mulai 16 hingga 25 September 2024.</p> <p>Manakala Markas Operasi Bersepadu (MOB) ditubuhkan di Ibupejabat Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan</p>	-	-	-	3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan	disepakati
	<i>Usulan Baru</i>							
1.	<i>pemanfaatan sumber daya Search and Rescue (SAR), IPTEK dan fasilitas komunikasi di setiap Daerah Perbatasan untuk memastikan kecepatan dalam merespon laporan kecelakaan kapal</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<p>Perkara ini memerlukan persetujuan ditingkat / kelulusan di peringkat pusat karena / kerana bersinggungan dengan azas dan kebijakan Pemerintah Pusat / menyentuh dasar dan polisi Kerajaan Pusat</p>	-	-	-	3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan	Belum disepakati

2.	<i>pertukaran informasi/data penumpang dan rute pelayaran yang melintas kapal perbatasan Riau-KEPRI dan Malaysia (Johor dan Malaka) serta kondisi cuaca untuk membantu menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan persetujuan ditingkat / kelulusan di peringkat pusat karena / kerana bersinggungan dengan azas dan kebijakan Pemerintah Pusat / menyentuh dasar dan polisi Kerajaan Pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
3.	<i>kerjasama manajemen kebencanaan (disaster management) mulai tahap Pra bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dalam bentuk koordinasi, bantuan teknis, dan mobilisasi sumber daya masing-masing</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan persetujuan ditingkat / kelulusan di peringkat pusat karena / kerana bersinggungan dengan azas dan kebijakan Pemerintah Pusat / menyentuh dasar dan polisi Kerajaan Pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
4.	<i>pertukaran Informasi terkait dengan kasus penyelundupan hasil tambang agar dapat dilakukan pencegahan dini bersama antara Intansi Malaysia dan Indonesia</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan persetujuan ditingkat / kelulusan di peringkat pusat karena / kerana bersinggungan dengan azas dan kebijakan Pemerintah Pusat / menyentuh dasar dan polisi Kerajaan Pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
5.	<i>kerja sama antara Bakamla Zona Maritim Barat dan dan Intansi Terkait Bersama PDRM dan APMM untuk bersama-sama bertukar informasi dan melakukan aksi</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan persetujuan ditingkat / kelulusan di peringkat pusat karena / kerana bersinggungan dengan azas dan kebijakan Pemerintah</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>pencegahan terkait lokasi pencemaran limbah laut, penanganan tumpahan limbah kapal (minyak hitam), dan pemberhentian, pemeriksaan dan penangkapan terhadap Kapal Pembuang Limbah di Laut</i>		<i>Pusat / menyentuh dasar dan polisi Kerajaan Pusat</i>					
6.	<i>tentang MOU Common Guideline (kapal nelayan tradisional, tanpa GPS, dan menggunakan alat pancing tradisional) kepada para penegak hukum dan nelayan di masing-masing wilayah. Hal ini diperlukan dalam rangka meminimalisir penangkapan nelayan yang memenuhi kriteria untuk dihalau kembali ke perairan negara asal berdasarkan MOU Common Guideline. Program sosialisasi ini perlu ditindaklanjuti dengan komitmen untuk saling bertukar informasi antar instansi yang berwenang tentang kegiatan sosialisasi yang</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan persetujuan ditingkat / kelulusan di peringkat pusat karena / kerana bersinggungan dengan azas dan kebijakan Pemerintah Pusat / menyentuh dasar dan polisi Kerajaan Pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>

	<i>telah dilakukan secara berkala</i>							
7.	<i>legalitas asal barang impor yang masuk ke wilayahnya dan keabsahan dokumen ekspor/ impor barang</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan persetujuan ditingkat / kelulusan di peringkat pusat karena / kerana bersinggungan dengan azas dan kebijakan Pemerintah Pusat / menyentuh dasar dan polisi Kerajaan Pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
8.	<i>Majlis Keselamatan Negara (MKN) Negeri Johor mencadangkan untuk melantik Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Negara (MCBA), sebagai ahli Bidang Kerjasama 3: Keselamatan dan Pengurusan Sempadan bagi SOSEK MALINDO 2025</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Pihak Riau / Kepri memaklumi / mengambil maklum usulan ini</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
<i>Imigrasi / Imigresen dan Bea dan Cukai / Kastam</i>								
1.	<i>Riau / Kepulauan Riau memberikan kesedaran / meningkatkan kepedulian masyarakat agar menggunakan laluan / jalur dan dokumen yang sah serta menggunakan identitas asli / identiti asal untuk tujuan keselamatan</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Keempat-empat pihak setuju / bersetuju memaklumi / mengambil maklum terkait / berkaitan usul / perkara tersebut</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>

2.	<i>Riau / Kepulauan Riau menginformasikan / memaklumkan bahwa imigrasi / imigresen sudah menjalankan pemeriksaan dokumen identitas / identiti asal calon pemohon berkaitan pengurusan dokumen passport dengan berdasarkan / berbasis single data kependudukan pada kad pengenalan / e-Kartu Tanda Penduduk (KTP)</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Keempat-empat pihak setuju / bersetuju memaklumi / mengambil maklum terkait / berkaitan usul / perkara tersebut</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
3.	<i>pihak Imigrasi Riau / Kepulauan Riau melaksanakan pencegahan awal ke atas individu yang masuk daftar hitam / yang disenarai hitam</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Keempat-empat pihak setuju / bersetuju memaklumi / mengambil maklum terkait / berkaitan usul / perkara tersebut</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
4.	<i>PDRM Johor mencadangkan satu forum / pencegahan tindak pidana perdagangan orang / anti pemerdagangan manusia. Perlunya kerjasama antara Negeri Johor dengan Provinsi KEPRI / Riau</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>KEPRI setuju dengan usulan untuk mencadangkan satu forum / pencegahan tindak pidana perdagangan orang / anti pemerdagangan manusia dengan melibatkan stakeholder terkait</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
<i>Usulan Baru</i>								

1.	<i>koordinasi, kerjasama dan komunikasi terkait penanganan penyelundupan narkotika, human trafficking, manusia perahu/Rohingya, dan barang bekas</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan kelulusan di peringkat pusat kerana menyentuh dasar dan polisi kerajaan pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
2.	<i>pengesahan masuk bagi paspor Warga Negara Indonesia (WNI) dan beberapa kategori Warga Negara Asing (WNA) yang berangkat dari Pelabuhan Batam Center sebagai implementasi pemberlakuan Auto Gate/E-Gate di Batam Center sejak 4 Januari 2024</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan kelulusan di peringkat pusat kerana menyentuh dasar dan polisi kerajaan pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>
3.	<i>Kerja sama untuk memperluas penyebaran informasi nomor pengaduan (hotline) pada setiap pintu masuk / tempat pemeriksaan imigrasi baik di Johor / Melaka dan Riau / KEPRI</i>	Kepri-Riau-Johor-Malaka	<i>Perkara ini memerlukan kelulusan di peringkat pusat kerana menyentuh dasar dan polisi kerajaan pusat</i>	-	-	-	<i>3. Bidang Keselamatan Dan Pengurusan Sempadan</i>	<i>Belum disepakati</i>



LAMPIRAN

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU INSPEKTORAT PROVINSI

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

Nomor : LHE.19/EVALUASI-SAKIP/ITPROV/2024
Tanggal : 17 OKTOBER 2024

(Dokumen ini merupakan dokumen daerah bersifat rahasia dan dilarang dipublikasikan
tanpa seizin Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INSPEKTORAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"

Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman

(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124

Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 17 OKTOBER 2024

Nomor : LHE-18/EVALUASI-SAKIP/ITPROV/2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

di

Tanjungpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 2.040/ST/ITPROV/DK/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sesuai dengan Standar Audit yang dikeluarkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI). Evaluasi dilakukan dengan tujuan:
 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;

4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- II.** Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024, serta dokumen terkait lainnya.
- III.** Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat," untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai sampai ke level individu.
2	A	>80 – 90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa intansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujud efisiensi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60 – 70	Baik. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30 – 50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0 – 30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 tersebut diperoleh nilai sebesar **68,10** yang menunjukkan kategori peringkat **B (BAIK)**.

IV. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi 2024
a. Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
b. Pengukuran Kinerja	30,00	18,60
c. Pelaporan Kinerja	15,00	9,75
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75
Total	100,00	68,10

Adapun uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebanyak 25 kriteria, meliputi:

1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja sebanyak 6 kriteria;
2. Kualitas Dokumen Perencanaan sebanyak 11 kriteria; dan
3. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja sebanyak 8 kriteria.

Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memperoleh nilai **21,00** dari bobot nilai 30,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memperoleh nilai **4,20** dari bobot nilai 6,00 dengan rincian:

1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;
2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;

3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;
 4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;
 5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja;
 6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
- Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memperoleh nilai **6,30** dari bobot nilai 9,00 dengan rincian:
1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan;
 2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu;
 3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
 5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai tertuang secara berkelanjutan (tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
 7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistik;
 8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);

9. Perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
 10. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
 11. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- c. **Perencanaan Kinerja cukup dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**
- Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memperoleh nilai **10,50** dari bobot nilai 15,00 dengan rincian:
1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai belum menginfokan adanya rapat/pembahasan;
 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
 4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.;
 5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
 6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
 7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
 8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

B. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 20 kriteria, meliputi:

1. Keberadaan Pengukuran Kinerja sebanyak 3 kriteria;
2. Kualitas Pengukuran Kinerja sebanyak 7 kriteria; dan
3. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja sebanyak 10 kriteria.

Capaian hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **18,60** dari bobot nilai 30,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Pemenuhan Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **4,20** dari bobot nilai 6,00. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah membuat SOP Pengumpulan data kinerja sebagai pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja internal berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Kualitas Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **5,40** dari bobot nilai 9,00 dengan rincian :

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan IKU belum formal masih draf;
3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;

6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
 7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **9,00** dari bobot nilai 15,00 dengan rincian :
1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi;
 4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;
 6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja;
 7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
 8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
 9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
 10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 22 kriteria meliputi:

1. Keberadaan Dokumen Laporan Kinerja sebanyak 6 kriteria;
2. Kualitas Dokumen Laporan Kinerja sebanyak 9 kriteria; dan
3. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja sebanyak 7 kriteria.

Capaian hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **9,75** dari bobot nilai 15,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Keberadaan Dokumen Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **1,80** dari bobot nilai 3,00 dengan rincian :

1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
4. Dokumen Laporan Kinerja telah direview belum ada data dukung;
5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan;
6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Dokumen Laporan Kinerja cukup memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya

Kualitas Dokumen Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **2,70** dari bobot nilai 4,50 dengan rincian :

1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;

4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 6. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
 7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- c. **Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**
- Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **5,25** dari bobot nilai 7,50 dengan rincian :
1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab);
 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
 3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
 5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
 6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 13 kriteria meliputi:

1. Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 3 kriteria;
2. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 5 kriteria; dan
3. Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 5 kriteria.

Capaian hasil evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **18,75** dari bobot nilai 25,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **3,50** dari bobot nilai 5,00 dengan rincian :

1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **5,25** dari bobot nilai 7,50 dengan rincian :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Implementasi SAKIP cukup meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (**dampak**) dalam **efektifitas dan efisiensi Kinerja**
- Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **10,00** dari bobot nilai **12,50** dengan rincian :
1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP walau belum signifikan dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal tahun sebelumnya;
 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja walau belum signifikan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

- V. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Melaksanakan aktivitas/pembahasan untuk mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Mereviu dokumen Laporan Kinerja;
 - c. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
 - d. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menginfokan hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Kami menghargai upaya Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh jajaran menindaklanjuti rekomendasi atas kelemahan-kelemahan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan unit kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BANDAR PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker		Catatan	Daftar Evidence	Link Data Dukung
			Jawaban	Nilai			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		21,00			
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	B	4,20			
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				terdapat Pedoman teknis perencanaan kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	SOP perencanaan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1EJGJn97evA1wWvbgNgQBjPjUNQs#usp=drive_link
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	RPJPD Pemprov Kepri	TERDAPAT DI BAPPEDA
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	Renstra (tingkat OPD)	https://drive.google.com/drive/folders/1EJGJn97evA1wWvbgNgQBjPjUNQs#usp=drive_link
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Perjanjian Kinerja 2024 Ess II, III dan IV	https://drive.google.com/drive/folders/1xKOF1h7_LuvSVtT6346tgb8lwDtmfQ#usp=drive_link
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Rencana Aksi 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1xKOF1h7_LuvSVtT6346tgb8lwDtmfQ#usp=drive_link
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	DPA, RKA (rekapan saja) 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1an693KN_iChWz_xBdxvMfPj6oAM38xPS7usp=drive_link
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,30			
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	PK Ess II, III dan IV yang sudah diformalkan	https://drive.google.com/drive/folders/1hICm2B0tqNPN-5ZM3eOv4OsR4ng#usp=drive_link
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				Dokumen Perencanaan Kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri yang dipublikasikan	SC dasboard upload dokumen pada website Pemda	https://drive.google.com/drive/folders/1gOHQc3j3qEiM6-5LxJF4Fl9v9LPkE#usp=drive_link
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai pengelola perbatasan daerah provinsi kepri yang dipublikasikan	Dokumen Renstra BAB II dan III tentang isu strategis	https://drive.google.com/drive/folders/1177tg5ZC4079eeAmanY47XvCJuHNC#usp=drive_link
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				Iku belum formal masih bentuk draft	Dokumen IKU dan Renstra Bab IV	https://drive.google.com/drive/folders/14QxHfOD7yF0pxu6YSD_w_Uh7Tqz#usp=drive_link
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Dokumen IKU dan Renstra Bab IV	https://drive.google.com/drive/folders/1RMdhfop87HU82mf5AA05IRDZ-KCo#usp=drive_link
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				Indikator Kinerja Utama (IKU) pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Renstra dan IKU OPD	https://drive.google.com/drive/folders/1Bu0sdZBk-ki7Vpdyrb0ewdeZmrk13?usp=drive_link
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistik.				Target Perencanaan Kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Renstra, Renja, PK dan LKjIP 2023	https://drive.google.com/drive/folders/12ugvXIRzUB_GlaA8tQzrZm-EutwXk2?usp=drive_link
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				Dokumen Perencanaan Kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Dokumen Cascading 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1EzD8Mxuud85o3G92xsm1lEWGcoYi7usp=drive_link
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				Perencanaan kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1U2imDhuAb-B71kep_Ayf_AToNcr#usp=drive_link
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				Rumusan Perencanaan Kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Renja dan PK Esselon II, III, IV tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/12Nhlcs_2TAUQO_CvTEQOSSzURpnhI#usp=drive_link
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				Penetapan Perencanaan Kinerja Pegawai badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	SKP seluruh pegawai 2024 perekonomian: Daftar Absensi 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1W9ACmffNxkElEaOCMEZ_6GDmknq#usp=drive_link

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker		Catatan	Daftar Evidence	Link Data Dukung
			Jawaban	Nilai			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	B	10,50			
Kriteria							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				Anggaran yang ditetapkan badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Notulen rapat pembahasan anggaran 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1X3G45Qoq35gWVyyzmgZ5AkbD7sGerm3?usp=drive_link
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				Belum ada notulen rapat pembahasan penyusunan LKjIP	Notulen rapat penyusunan Rapat Pembahasan Penyusunan LKjIP Tahun 2023, Rencana Aksi dan PK tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1hL5082H72eB_4ka57-OtMg2zmFlF7uspodrive_link
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.				Hasil evaluasi renja masih draft	Hasil evaluasi Renja Triwulan IV tahun 2023; LKjIP tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/10Y1Mya5OY_typeJPhBfDQ_i0KDzHGW?usp=drive_link
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				Rencana aksi kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Laporan monev triwulan (TW I 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1E7em_mnpq3eqh9CQJb2aYh733aP0d?usp=drive_link
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				Dokumen Perencanaan Kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Tabel rencana perbaikan dokumen perencanaan kinerja 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1H3iaUm7M8RvCa8Prf9HfNznonWm?usp=drive_link
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				Dokumen Perencanaan Kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Tabel rencana perbaikan dokumen perencanaan kinerja 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1_ToT76A3Uok6frXatsWzH22rf407X2uspodrive_link
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Komitmen kinerja satuan kerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	PK Esseion II, III, IV tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1C_msqPuh320l7KAaL263Aer_H11cs3?usp=drive_link
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	SKP Pejabat Esselon dan staff dibawahnya tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Gu1woobvAWdmHqrgwsWtYfQV1_GEF?usp=drive_link
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		18,60			
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	B	4,20			
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				mekanisme pengumpulan data kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1HOWchkuF8rhsgfURQW4uP933tU7w?usp=drive_link
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				Definisi Operasional kinerja dan cara mengukur indikator kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	Dokumen IKU/Manual Indikator/Definisi Operasional	https://drive.google.com/drive/folders/1NDXXZL6h-X812ORR/x918gVMvHCA?usp=drive_link
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				Mekanisme pengumpulan data kinerja badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepri	1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1PVLYOJedgNnq9NmCj82U-182EL?usp=drive_link
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	CC	5,40			
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	Undangan rapat yg di ttd oleh pimpinan, memimpin rapat, memberikan rekomendasi; Dokumentasi (tahun 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1J_vQad2ND3NaqBye9sdccLueXo9Ef7u?usp=drive_link
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				IKU belum formal masih bentuk draft	IKU; definisi operasional	https://drive.google.com/drive/folders/17Tndf6S2zN9hXUPOF7N_fewWt7?usp=drive_link
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				Data kinerja BP2D yang mendukung capaian kinerja	Dokumen IKU, Laporan Monev triwulan (TW 1 tahun 2014)	https://drive.google.com/drive/folders/15-1NafqW3qVh1Yq5y-9etNzCBData?usp=drive_link
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Penjadwalan atas pemantauan kinerja/ laporan monev triwulan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1_bAMW1teWTsCubRicKEvek7?usp=drive_link
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2024 Triwulan I	https://drive.google.com/drive/folders/1j1PTEUZZs8yNcM026kr-sG0V72?usp=drive_link
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pengumpulan telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Nota dinas pengumpulan data kinerja dari pimpinan tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1GQ5yYoc5CW9tuIwz7f5pePC35pxgb?usp=drive_link
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Pengukuran capaian kinerja Teknologi Informasi (Aplikasi) BP2D	SKP tahunan di Simanja (sample pegawai)	https://drive.google.com/drive/folders/115B0rh2Zoip5T0q2vPOQCUPIG9?usp=drive_link

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker		Catatan	Daftar Evidence	Link Data Dukung
			Jawaban	Nilai			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	CC	9,00			
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				Pengukuran kinerja oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara berkala (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Keputusan/ kesepakatan bersama terkait mekanisme pemberian reward n punishment	https://drive.google.com/file/d/13nUH44LUTzvfp22XlnhinesT0ik_v/view?usp=sharing
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				Pengukuran Kinerja penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Pergub Mutasi nomor 71 tahun 2017	https://drive.google.com/file/d/13nUH44LUTzvfp22XlnhinesT0ik_v/view?usp=sharing
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi Pada BPBD Prov Kepri	Rable renja APBD-P 2024	https://drive.google.com/file/d/1W7jag8CV-yZURh66ICJUo24_kyjKAU7uspdrive_link
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				Pengukuran kinerja penyesuaian Strategi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Draft perubahan Renstra dalam bentuk tabel jika ada	https://drive.google.com/drive/folders/19MNEp3xO6o22xCP03In21214effC2uspdrive_link
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				Pengukuran kinerja penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Notulen rapat pembahasan capaian kinerja tahun 2024 TW 1	https://drive.google.com/drive/folders/16iB7jPhOTVlch8orWNVw3958Vu7uspdive_link
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				Pengukuran kinerja penyesuaian Strategi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Draft perubahan Renstra dalam bentuk tabel jika ada	https://drive.google.com/drive/folders/18NzUvftaMa7elCjWVWNTvTGeht-Ws_zuspdrive_link
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.	DPA Perubahan	https://drive.google.com/drive/folders/1612jkVf1tNvD3c35eN_dewAdey552a0?usp=drive_link
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				efisiensi atas penggunaan anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Laporan Kinerja tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1Kcv45ULh7zaqpkV8-n70a_53t6IA?usp=drive_link
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Kepedulian satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Pemantauan atas Rencana Aksi TW I tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Xm8bWjky-mrt2zrcyAK53yQX-0a?usp=drive_link
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja BP2D	SKP Pegawai 2024	https://drive.google.com/drive/folders/10RgFT13C1z_joVvB1-LcIDpXan85?usp=drive_link
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		9,75			
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	CC	1,80			
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Dokumen Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	LKJ OPD tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/10kgfDStmG1meGM2th0YDofyozA?usp=drive_link
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala oleh BP2D	Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja TW I s/d IV tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/18LbxR2rsfh-WpcQmM7zW2qhmkt?usp=drive_link
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan oleh BP2D	LKJ yang sudah di tanda tangan kepala OPD	https://drive.google.com/drive/folders/1XsP-ge69c65F2xUjLB-5Gg28d7MhB2?usp=drive_link
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direview.				Dokumen Laporan Kinerja telah direview oleh BP2D	Bukti dukung atas draft Laporan Kinerja yg direview oleh pimpinan	https://drive.google.com/drive/folders/1XhM1ccsB8mcBKMr4s48PnsXzDphQ?usp=drive_link
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan oleh BP2D	Bukti upload dalam website pemda/ OPD	https://drive.google.com/drive/folders/1xFct9N9zEEeu4Cdml67uzlhWqVcs?usp=drive_link
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan oleh BP2D	Surat pengantar LKJ OPD kepada Gubernur melalui Biro Organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1yo5FJhCIP89zeWogc-q5Pxd1Psv5?usp=drive_link
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	CC	2,70			
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar BP2D	Laporan Kinerja 2023	https://drive.google.com/drive/folders/15FaPNbf4xU-ffOpV8tytsgsUkUm7uspdrive_link
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja BP2D	Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/110f4oQgkz73-2xXTMDAQuh6N_86uz?usp=drive_link
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja BP2D dengan target tahunan.	Lembar Bab 3 LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/1hCuVey9v1c18k5eANQYCY0SeP3mt?usp=drive_link
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja BP2D dengan target jangka menengah.	Lembar Bab 3 LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/13qGavyDib0-istN77kgY9D5i7?usp=drive_link
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				Dokumen Laporan Kinerja perbandingan realisasi kinerja BP2D	Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/11LM_AY000SFaLhsIQEMTSMiC95w?usp=drive_link

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker		Catatan	Daftar Evidence	Link Data Dukung
			Jawaban	Nilai			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				Berul menyajikan Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1Hf3GzGogtp9mXOZON203Kfw_ykr7usp-drive_link
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				Berul menyajikan Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1J043vE_stqHoYpsGr2iV707624Jh-7y7usp-drive_link
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja BP2D	Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/137m02pMf_5LmAzg4Ff11yW25-KpeWg7usp-drive_link
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)				Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	Laporan Kinerja Bab IV Penutup	https://drive.google.com/drive/folders/1YMrngG8NWh-n5sBj1See1DulfxtCPCa7usp-drive_link
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25			
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Berlanggung Jawab)				laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan BP2D	Notulen rapat pembahasan realisasi sampai dengan tahun berjalan, metode pencapaian kinerja, dan rekomendasi kedepan tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1J2xQfSmB7CsqA2oID-t2y5rV3-Wk7usp-drive_link
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai BP2D	Absensi/ notulen rapat penyusunan LKj tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1tq3T2wz24To1r70tgXmuqwo-CxY7usp-drive_link
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja BP2D	Notulen rapat terkait laporan berkala per triwulan atas capaian rencana aksi tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1AcwA1mGfCat3twEVPIQerNBrKOF-N317usp-drive_link
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja BP2D	Notulen rapat terkait capaian/ realisasi anggaran 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1v_SxPegFT22jQZ-TvSN406mCrabaw7usp-drive_link
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja BP2D	Notulen rapat terkait evaluasi atas kinerja berkala, didapat dari laporan kinerja berkala 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1BVVU3Gjg73q9E81YAXSLBFQ7e-y7usp-drive_link
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi BP2D	SC laporan kinerja bab 4 yang memuat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	https://drive.google.com/drive/folders/1kYC1wMYRQ9ycouophnUJUf0z-Trixy7usp-drive_link
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				Pengaruh perubahan budaya kinerja organisasi BP2D	Laporan implementasi inovasi budaya kerja SIAP	https://drive.google.com/drive/folders/1anNb5RQ-ey3gCB118z2QewF1w1_mAie7usp-drive_link
4	EVALUASI/ AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		18,75			
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	B	3,50			
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				pedoman teknis Evaluasi/ Akuntabilitas Kinerja Internal BP2D	SOP evaluasi AKIP Internal OPD	https://drive.google.com/drive/folders/1M90C7avHcb2unW7fUm49zQfGjgRQ7usp-drive_link
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja BP2D	LKE yang telah diisi secara mandiri oleh Satker (Penilaian Mandiri) di ttd oleh Kepala	https://drive.google.com/drive/folders/1vrxQsof-gq7xzh1N1-awvvIhg7usp-drive_link
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan BP2D	LKE yang telah diisi secara mandiri oleh Satker (Penilaian Mandiri) di ttd oleh Kepala	https://drive.google.com/drive/folders/1bbBb6ndcvwgH07u5fNpo4vBkg-XYs7usp-drive_link
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25			
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BP2D telah dilaksanakan sesuai standar	LKE yang telah diisi secara mandiri oleh Satker (Penilaian Mandiri) di ttd oleh Kepala	https://drive.google.com/drive/folders/12gT3Nwpcz2p6cukA5v-SDELUvCdvo7usp-drive_link
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				PKS terkait evaluasi sakip	Sertifikat mengikuti pelatihan evaluasi sakip/ PKS terkait evaluasi sakip	https://drive.google.com/drive/folders/1vectOsIbe_gIRAkPK-CAC4ivKVGDAD7-lop-drive_link
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BP2D telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Memorandum, bukti disposisi pimpinan kepada tim evaluasi Internal sebagai bentuk koordinasi	https://drive.google.com/drive/folders/1937451yneC-jnRfTl7Vo2zmozoP7usp-drive_link
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BP2D telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	LKE yang telah diisi secara mandiri oleh Satker (Penilaian Mandiri) di ttd oleh Kepala	https://drive.google.com/drive/folders/11_BALMWU1ewVs3DuhllczRcEvqI2-zusp-drive_link
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BP2D telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	LKE yang telah diisi secara mandiri oleh Satker (Penilaian Mandiri) di ttd oleh Kepala	https://drive.google.com/drive/folders/1Mwv7yLzqerfOm3amWvYCoStK7e7usp-drive_link
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker		Catatan	Daftar Evidence	Link Data Dukung
			Jawaban	Nilai			
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			peningkatan implementasi SAKIP			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja		1. Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2023) 2. Laporan Kinerja Tahun 2023; 3. Matriks tindak lanjut atas rekomendasi APIP tahun 2023 dan bukti data tindak lanjutnya	https://drive.google.com/drive/folders/1u1FAzElIwspZ4DFNxTMervX8tt7us <u>drive_link</u>
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas			

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	68,10
KESIMPULAN	B
INTERPRESTASI	Baik